

**OPINI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG PUAS DAN
TIDAK PUAS DALAM PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO
WIDODO PERIODE 2014-2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program Studi
Ilmu Politik**

Oleh :

Sisi Anggun Pratiwi

1657020121

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG 2019
1441 H / 2019 M**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

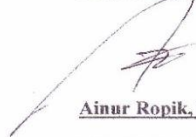
Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sisi Anggun Pratiwi dengan NIM. 1657020121 yang berjudul **“Opini Masyarakat Kota Palembang Puas dan Tidak Puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.

Wassalam

Palembang, 1 November 2019

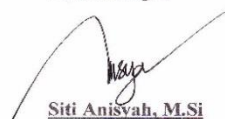
Pembimbing I



Ainur Ropik, M.Si

NIP. 197906192007101005

Pembimbing II



Siti Anisvah, M.Si

NIDN. 2012129302

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Sisi Anggun Pratiwi
NIM : 1657020121
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Opini Masyarakat Kota Palembang Puas dan Tidak Puas
Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

Telah di munaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari /Tanggal : Kamis, 7 November 2019
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 7 November 2019
DEKAN,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001


TIM PENGUJI

KETUA,




Dr. Andi Candra Java, M.Hum
NIP. 197201192007011011

SEKERTARIS,




Erik Darmawan, M.Hi
NIDN. 0217057402

PENGUJI I,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

PENGUJI II,



Badarudin Azarkasyi, MM
NIDN.2026068402

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisi Anggun Pratiwi
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 15 Januari 1999
NIM : 1657020121
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Opini Masyarakat Kota Palembang Puas dan Tidak Puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan *pengarahan pembimbing*.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 1 November 2019




Sisi Anggun Pratiwi
NIM.1657020121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kita mau jadi apa dan akan jadi apa, itu semua ditentukan oleh pilihan dan tindakan kita hari ini. “One Day Can Change Everything”.

Sujud syukur ku persembahkan kepada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku kepada orang-orang tersayang:

- 1. Papa, laki-laki nomor satu di dunia, You ‘ll always be my hero***
- 2. Almh. Mama, wanita nomor satu di dunia, Insyaallah di surga kita akan bertemu lagi***
- 3. Mama, terimakasih telah memberikanku kasih sayang yang tulus***
- 4. Adik-adikkutersayang dan mbakku tersayang***
- 5. My patner :Arief, yang memberikan semangat, perhatian, doa dan membantu skripsi ini sampai selesai***
- 6. Sahabat-sahabatku : Kiki, Yelin, Tiyak, Mbak Vanessa***
- 7. Kampusku***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun dengan permasalahan yang akan di bahas mengenai bagaimana opini masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bagaimana dampak dari opini masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan deskriptif dan pendekatan kualitatif, di mana metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Kota Palembang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo karena adanya permasalahan di Indonesia dari segi ekonomi mengalami penurunan, dan harga bahan pokok di Indonesia melonjak tinggi, masyarakat beranggapan bahwa Presiden Joko Widodo kurang mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat kecil dan dampak ketidakpuasan tersebut dikarenakan aktivitas masyarakat kota Palembang terbatas karena semua barang pokok melonjak naik membuat perekonomian berkurang dan membuat masyarakat terbebani dan merasa tidak sejahtera.

Kata Kunci : Puas dan Tidak Puas, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo.

ABSTRACT

This study aims to determine the opinion of the people of Palembang City satisfied and dissatisfied in the Government of President Joko Widodo. As for the issues that will be discussed about how the opinion of the people of Palembang in the Government of President Joko Widodo and how the impact of the opinion of the people of Palembang in the Government of President Joko Widodo. This research uses descriptive writing type and qualitative approach, where this qualitative method is a research procedure that produces data in the form of written or oral words from people or the observed behavior. The results of this study explained that the people of Palembang City were dissatisfied with the performance of President Joko Widodo's government because of problems in Indonesia in terms of economy had decreased, and prices of staples in Indonesia had skyrocketed, people thought that President Joko Widodo was not listening to the aspirations of small communities and the impact of the dissatisfaction is because the activities of the people of Palembang are limited because all the staple goods jumped up making the economy decrease and making the people burdened and feeling unwell.

Keywords: Satisfied and Dissatisfied, Government, President Joko Widodo.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabaarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta masih diberi-Nya kekuatan, perlindungan, dan kesehatan kepada penulis hingga saat ini dan Insya Allah seterusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Opini Masyarakat Kota Palembang Puas dan Tidak Puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019”**. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang Insya Allah tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Adapun tujuan penulis dari Skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tuatercinta, Papa dan Mama yangselalumendoakandanmemberikansemangatkepadasaya.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.DselakuRektorUniversitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini dan Ibu Siti Anisyah M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis.
6. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. BapakDr. AndiCandra Jaya, M.Humsebagai ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Erik Darmawan, S.IP., M.H.I sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
9. Ibu Mariyatul Qibtiyah, S.Sos.,MA.Si selaku Dosen PA saya.
10. Seluruh staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
11. Keluarga besar, adik-adik tercinta dan mbakku tercinta yang selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik dan memberikan dorongan baik secara materil maupun non materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman terbaikku, yang setia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar ILPOL 4 dan Venom saya ucapkan banyak terimakasih untuk waktunya.

14. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabaarakatuh

Palembang, 1 November 2019



Sisi Anggun Pratiwi
1657020121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PerumusanMasalah.....	9
C. TujuanPenelitian	9
D. KegunaanPenelitian.....	10
E. TinjauanPustaka	10
F. KerangkaTeori.....	16
G. MetodologiPenelitian	17
1. Pendekatan Metode Penelitian	17
2. Data dan Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	20

5. Teknis Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. GambaranUmum Kota Palembang	25
1. Sejarah Kota Palembang	25
2. Lokasi dan Peta Palembang	27
3. Keadaan Geografis	28
4. Data Kependudukan	31
B. Biografi Joko Widodo	32
C. Program padamasapemerintahanPresidenJokoWidodo	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. OpiniMasyarakat Kota Palembang dalamPemerintahanPresiden JokoWidodo	42
B. Dampak dari OpiniMasyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.....	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang	29
Tabel 2.3 Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Madya di Kota Palembang	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teknik Analisis Data	23
Gambar 2.1 Peta Kota Palembang	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 dan Ideologi Pancasila, dimana negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia.¹

Pemerintah di Indonesia adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu, dan pemerintah wajib melayankan.²

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “*checks and balances*”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah

¹ UUD 1945 pasal 4 ayat (1)

² Talizidudu Ndhara. 2003. *Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h. 6.

penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut.

Sistem Pemerintahan menjadi landasan bagi setiap negara untuk mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negaranya yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil.³ Setiap negara membuat pilihan terhadap sistem pemerintahan yang dianutnya dengan berbagai pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan karakter negaranya dan hubungannya dengan sistem-sistem ketatanegaraan lain yang berlaku di ahli, berpengaruh terhadap keberhasilan demokrasi di suatu negara. Namun di lain pihak terdapat juga fenomena bahwa sistem pemerintahan yang dianggap rawan gagal demokrasi justru menunjukkan popularitas semakin tinggi.⁴

Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanggung jawaban Pemerintahan adalah pertanggung jawaban pribadi (personal, bukan private) dan individual pelaku pemerintahan terhadap setiap konsumen

³ Mikail, Kiki. "PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed January 31, 2020. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.

⁴Dr.Fitra Arsil, S,H. 2017. *Teori Sistem Pemerintahan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, h. 9.

secara pribadi dan individual dalam hubungan pemerintahan, sehingga peristiwa pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Pemerintahan mempunyai tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Tujuan pemerintahan sebagai berikut :

1. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
2. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil.
3. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
4. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
5. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik.
6. Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran.
7. Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
8. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.⁶

⁵ *Op.Cit.*, h. 6-7

Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat telah melalui perjalanan sejarah panjang dalam kepemimpinan nasional sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki tujuh orang presiden, sejak Presiden Ir. Soekarno, hingga Presiden yang baru terpilih dalam Pemilihan Presiden 2014, Ir. H. Joko Widodo.

Presiden Ir. H. Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah nasional.

Namun demikian walaupun Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat yang ketika kampanye banyak mengusung tema kesejahteraan “wong cilik” dan stabilitas nasional serta memiliki bekal pengalaman yang cukup baik ketika memimpin Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambilnya seringkali membuat kontroversi dalam masyarakat, dengan berbagai permasalahan yang mulai nampak ke permukaan sejak awal beliau dilantik menjadi Presiden.

⁶ Nia Karniawati (2015) *Hakikat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat)*. Vol. 1, No.2. h. 205.

Hal tersebut diakibatkan oleh sikap Presiden Jokowi yang dianggap kurang tegas dalam memutuskan suatu permasalahan politik serta kebijakan yang dikeluarkan Presiden seringkali dianggap sebagai kebijakan yang menguntungkan partai pendukungnya. Masyarakat menilai Jokowi telah “tersandera” oleh partai-partai politik pendukungnya, dimana hal terlihat dari komposisi menteri-menteri pada Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi dan Jusuf Kalla didominasi oleh kaderkader partai pengusung dirinya dalam Pemilihan Presiden tahun 2014.

Harapan baru dan semangat baru tumbuh dalam semangat nawa cita. Semangat untuk melaksanakan pembangunan nasional ternyata harus dihadapkan dengan perekonomian global yang cenderung melambat.⁷ Perekonomian di dunia pada tahun 2015 akan terkoyak dan cenderung melambat. Hal ini juga berimbas kepada perekonomian Indonesia yang cenderung melambat. Sehingga mempengaruhi roda Pemerintahan Presiden Joko Widodo.⁸

Selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dari segi ekonomi. Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup ambisius yakni 7% pada 2019. Namun dengan adanya permasalahan yang timbul ternyata realisasinya masih rendah. Sejak pertama dilantik memimpin Republik Indonesia, hingga kini pertumbuhan ekonomi tidak pernah menyentuh 6%. Tahun lalu baru mencapai 5,07%, bahkan pertumbuhan

⁷ Mikail, K. (2018). IJTIHAD POLITIK ISLAM PALEMBANG DI MASA ORDE BARU. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30-53.

⁸ Umar mubdi 2016, Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Vol. 3, No. 1. H. 2.

sempat menyentuh 4,79% pada 2015. Beberapa sasaran jangka menengah lain yang meleset adalah nilai tukar rupiah yang ditargetkan Rp 12.050 per dolar Amerika Serikat (AS). Kenyataannya nilai tukar acuan rupiah yang diperdagangkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate melemah cukup dalam, yakni Rp 15.193 per dolar AS.

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo kritik juga muncul pada penegakkan hukum terkait pengusutan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi bertahun-tahun lalu dan belum selesai hingga kini. Padahal Nawacita keempat berbunyi Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memberi rapor merah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait keseriusan pemerintah untuk mengusut pelanggaran HAM berat, ada sembilan kasus HAM berat yang bertahun-tahun belum juga diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.⁹

Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasus-kasus korupsi sepertinya menjamur. Ini terbukti dengan banyaknya pejabat tinggi, kepala daerah dan anggota dewan yang dicokok KPK. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), selama lima tahun pemerintahan Jokowi, ada 23 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI, dua kasus melibatkan menteri, dan 85 kepala daerah.

⁹Ameidyo Daud, *Menakar Rapor Kinerja Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*, <https://katadata.co.id/telaah/2018/10/26/catatan-rapor-biru-dan-merah-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>, Diakses tanggal 12 November 2019.

Banyak program di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak transparan dan akuntabel. Program-program tersebut, dijalankan dengan terburu-buru tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada DPR atau pun publik. Banyak hal dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada penjelasan dan mengabaikan prinsip good governance. hal tersebut pada awalnya dapat terlihat dari penggabungan, pemisahan, dan perubahan nomenklatur kementerian yang sampai sekarang tak pernah dijelaskan secara rinci apa tujuannya.¹⁰

Hal paling mendesak tentunya terkait tuntutan elemen masyarakat, penggiat anti korupsi dan mahasiswa tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut kembali UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR bersama pemerintah. Bagaimanapun, Jokowi harus segera mengambil sikap tegas tentang penerbitan Perppu ini, jangan lagi tersandera oleh kepentingan politik. Sebab resikonya bagi Jokowi, jika menganggap sepele tentang tuntutan penerbitan Perppu, akan dicap sebagai presiden yang tidak pro rakyat. Terlepas dengan segala kekurangannya, KPK adalah lembaga yang sudah begitu dekat dengan rakyat. Wajar, jika akhirnya sense of belonging rakyat terhadap lembaga antirasuah ini begitu besar.

Dari segi keamanan pada saat masa Pemerintahan Preside Joko Widodo banyaknya kerusuhan yang terjadi yang menyebabkan banyak

¹⁰Ihsanuddin, *Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Prinsip Good Governance*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/23/09202591/Presiden.Jokowi.Dinilai.Abaikan.Prinsip.Good.Governance>, Diakses tanggal 12 November 2019.

korban jiwa, bukan menafikan peristiwa di Wamena dan daerah lainnya, tentunya yang paling perlu mendapatkan perhatian lebih adalah konflik yang terjadi di Papua. Kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang seakan tak mau berhenti diyakini ada pihak-pihak yang mendompleng. Mereka adalah kelompok yang tidak senang dengan keberadaan Papua yang mulai maju, karena diperhatikan pemerintah. Banyak pihak yang sering memutarbalikan fakta tentang keberadaan aparat keamanan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Permasalahan-permasalahan yang timbul turut memicu situasi politik semakin memanas sehingga membuat gejolak di berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama yang mencakup hajat hidup orang banyak, seperti ketika Jokowi memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian diturunkannya kembali, serta kekisruhan pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian berujung pada konflik antara KPK-POLR.¹¹

Dimulai dengan banyaknya permasalahan-permasalahan pada saat masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwasannya akan berdampak terhadap masyarakat. Pertanggung jawaban ketika menjabat menjadi Presiden RI itu penting, karena ketika banyaknya permasalahan yang timbul pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya masyarakat yang sudah memilih akan kecewa dan merasa tidak

¹¹ TribunManado.co.id, *Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam)*. <https://manado.tribunnews.com>, diakses tanggal 12 November 2019.

puas. Dengan adanya permasalahan-permasalahan pada saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo, selanjutnya bagaimana dengan Opini Masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana opini Masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan mengambil judul skripsi : **“Opini Masyarakat Kota Palembang Puas dan Tidak Puas Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Opini masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019 ?
2. Bagaimana dampak dari Opini Masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Opini masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui dampak dari Opini Masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna dalam memberikan pemahaman bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya terhadap Ilmu Politik yang mengkaji tentang Opini Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Serta dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Opini Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian
1	Rizki Fauzy Sangaji 2018, “ <i>Penerapan Analisis Sentimen Untuk Menilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Joko Widodo Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Support Vector Machine</i> ”. ¹²	Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat trend penggunaan media sosial saat ini, yang tidak sebatas untuk menunjukkan eksistensi secara personal tetapi mulai diarahkan untuk melakukan kritik-kritik sosial salah satunya yang paling sering disuarakan oleh warganet atau netizen adalah menilai kinerja pemerintah. Tentu saja hal ini menarik untuk diteliti dan dijadikan sebagai indikator permasalahan dalam tulisan ini dengan begitu penelitian mencoba memanfaatkan Twitter dengan menganalisis tweet berbahasa Indonesia yang membicarakan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian yang dianalisis merupakan opini masyarakat terkait untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja

¹²Rizki Fauzy Sangaji 2018, *Penerapan analisis sentimen untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo pada media sosial twitter menggunakan support vector machine*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

		pemerintahan Presiden Joko Widodo.
2	Putra Aditya Lapalelo 2016, “ <i>Bingkai Sosok Jokowi Sebagai Presiden Dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas edisi 19-21 Oktober 2015</i> ”. ¹³	Berdasarkan hasil penelitian Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum saat ini sebesar 46.0%. Yang tidak puas 51,1%. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57.5% ke 46.0% atau sekitar 11.5%. Penurunan kepuasan dalam setahun pemerintahan pasangan Presiden Jokowi-JK versi survei Indo Barometer ini menjadi sorotan dan direspon berbeda oleh berbagai SKH termasuk SKH Jawa Pos dan Kompas.
3	Theresia D. Wulandari 2016, “ <i>Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Menurut Kaca Mata 5</i> ”	Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama setahun pemerintahan sudah

¹³Putra Aditya Lapalelo 2016, *Bingkai sosok Jokowi sebagai Presiden dalam pemberitaan setahun pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas edisi 19-21 Oktober 2015*. Skripsi universitas Surabaya.

	<i>Media Massa Di Indonesia</i> ”. ¹⁴	dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dimulai dari survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Jusuf Kalla menjelang setahun masa pemerintahan, yang diterbitkan oleh Indo Barometer, pada 8 Oktober 2015 bertajuk “Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK,”. Disebutkan bahwa sepanjang pemerintahan Jokowi-Kalla, telah terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla dalam masa menjelang setahun pemerintahan mereka jika dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu.
4	Efriza 2018, “ <i>Refleksi Dalam Memaknasi Eksistensi Rakyat : Antara Pemelihan</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden sebesar 68,3

¹⁴Theresia D. Wulandari 2016, *Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menurut kaca mata 5 media massa di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, e-Jurnal Katalogis, Vol .3, No.1.

	<i>Presiden Dan Pemilihan MPR.</i> ¹⁵	<p>persen tersebut, ini yang menjelaskan bahwa pilihan rakyat dalam realitas demokrasi di Indonesia tidaklah menghasilkan orang-orang bodoh ke tampuk kekuasaan dan kondisi rakyat kita bukanlah “pemilih yang bodoh” buktinya rakyat dapat menghindari diri dari terpilihnya orang-orang bodoh dalam tampuk kekuasaan. Serta keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi tergambarkan dari kepuasan rakyat Indonesia tersebut, ini juga menunjukkan bahwa keterpilihan calon presiden 2014 lalu yang dapat kita anggap memang dapat memenuhi kehendak rakyat melalui kebijakan publik yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia sehingga rakyat menyatakan kepuasannya terhadap Presiden Jokowi.</p>
5	Umar Mubdi 2016, <i>“Relasi Pembantu</i>	Berdasarkan hasil penelitian bahwa keyakinan publik Indonesia atas

¹⁵Efriza 2018, *Refleksi dalam memaknasi eksistensi rakyat : antara pemelihan presiden dan pemilihan MPR*. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakart., e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No.1.

	<p><i>Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi – JK</i>".¹⁶</p>	<p>Kepemimpinan dan Keberlangsungan atau kepuasan terhadap terhadap pemerintahan pemerintahan Jokowi-JK terhadap Pemerintahan Jokowi kian meningkat. Dengan kata lain Pemerintahan Jokowi-JK relatif stabil meski menyimpan silang pendapat diantara para pembantunya.</p>
--	---	--

Dari keseluruhan penelitian yang peneliti telah tinjau berkaitan dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik meneliti tentang tingkat kepuasannya. Adapun yang membedakannya penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang Presiden Joko Widodo, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada tingkat kepuasan masyarakat Kota Palembang terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari keseluruhan pustaka yang peneliti telah tinjau belum ada penelitian yang membahas tentang tingkat kepuasan masyarakat Kota Palembang terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

¹⁶Umar Mubdi 2016, *Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi – JK*. Universitas Gadjadara Yogyakarta, e-Jurnal Katalogis, Vol. 1, No.3.

F. Kerangka Teori

Teori Kepuasan

1. Pengertian Kepuasan

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan maka seseorang akan merasa tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka seseorang merasa puas. Jika kinerja melebihi harapan maka seseorang merasa amat puas atau senang.¹⁷

2. Teori kepuasan

Teori kepuasan dikemukakan oleh Christopher C. Heathwood. Heathwood mengemukakan bahwa hasrat terhadap kepuasan adalah persoalan abstrak karena bersifat batiniah. Hasrat terhadap kepuasan hasrat terdalam dari diri seorang manusia. Namun demikian kepuasan dapat diukur secara empiris karena kepuasan berkait langsung dengan kesejahteraan hidup. Seseorang merasakan dirinya puas disebabkan oleh hidupnya yang sejahtera. Sebaliknya seseorang merasakan dirinya tidak puas disebabkan oleh hidupnya yang tidak sejahtera.¹⁸

Hidup sejahtera dapat diukur dari subyektif menyediakan informasi kunci tentang kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup juga bergantung pada kondisi obyektif dan peluang masyarakat dan

¹⁷Tiara Citra Mukti (2017) *Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen*. VoL. 2, No. 1. h. 18.

¹⁸Christopher C. Heathwood (2005) *Desire-Satisfaction Theories Of Welfare*, Pascasarjana Universitas Massachusetts Amherst, h.5-6.

indikator-indikator kualitas hidup dalam segenap dimensinya harus mengukur kesenjangan secara komprehensif.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas mengenai teori kepuasan tersebut, penelitian berjudul Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palembang Terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019, akan meneliti menggunakan teori kepuasan, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang tingkat kepuasan masyarakat Kota Palembang terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif, sebuah penelitian yang di buat dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena secara objektif.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Prosedur penelitiannya bersifat menggambarkan dan mengungkapkan, menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban mengenai Opini Masyarakat Kota

¹⁹Muhajirin Maya Panorama (2018). *Pendekatan Pratikis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitati*, Yogyakarta : Idea Press, h. 138.

Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Palembang. Pemilihan anggota masyarakat sebagai informan didasarkan atas beberapa kategori yang dianggap mewakili masyarakat kota Palembang yaitu berbagai jenis Profesi : TNI, Polisi, Dosen, Guru, Pengusaha, Satpam, Pegawai Swasta, Pedagang, Petani, dan Buruh, dan mengambil 2 sampel dari masing-masing profesi jadi hasilnya ada 20 informan yang peneliti wawancarai. Demikian informan dalam penelitian ini adalah Laki-Laki ataupun Perempuan yang berusia antara 17-60 Tahun dari berbagai jenis profesi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. misalnya, yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung.²⁰ Wawancara dilakukan kepada para informan, dengan menggunakan alat perekam, kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Peneliti akan meminta izin agar informan bersedia untuk diwawancarai menggunakan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu Teknik sampling representatif yang dimana penentuan sampel berdasarkan dari perwakilan dari suatu golongan tertentu dimana data yang berupa tulisan, rekaman dari suatu perwakilan, dengan ini dapat melengkapi data yang di berikan oleh setiap perwakilan atas golongan tersebut.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 202-203.

²¹Artikel Siana 2017, <https://www.artikelsiana.com/2018/01/pengertian-representatif-representasi-menurut-para-ahli-proses-contoh.html> di akses tanggal 16 Agustus 2019.

b. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang²² dan pengumpulan data yang berkaitan Opini Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersumber dari buku-buku jurnal, internet, berita dan sumber yang lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palembang yang berfokus pada melihat Opini Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. Dengan demikian yang menjadi perhatian dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan, evaluasi dari sebuah situasi sebuah permasalahan yang di bahas, termasuk didalamnya

²²Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, h. 240

peninjauan dari berbagai aspek sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.²³

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul. Tahap-tahap yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.²⁴ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan terhadap Opini

²³ *Ibid.*, h. 243

²⁴ *Ibid.*, h. 247

Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

b. Penyajian Data

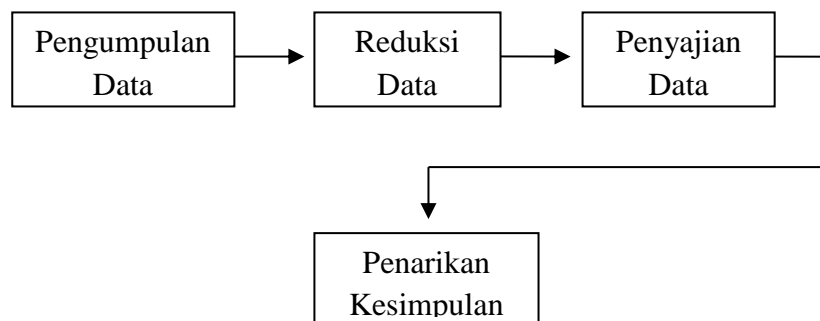
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. mekanisme yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numeric agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah.²⁵ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan Opini Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian akhir atau bagian kesimpulan, yang semua data disimpulkan secara singkat, padat, dan jelas. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik permasalahan tentang Opini Masyarakat Kota Palembang puas dan tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

²⁵ *Ibid.*, h. 249

Gambar 1.1. Teknik Analisis Data



Sumber : Diolah Peneliti.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian serta metodologi penelitian yang menjelaskan tipe, pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai lokasi objek yang akan menjadi tempat penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dari jawaban rumusan masalah, dan informasi yang dianalisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di dapat dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Sejarah Kota Palembang

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang diketemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi (tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 syaka). Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.

Keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau-danau kecil, dan aneka bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kahyangan. Sebenarnya, dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng, dan puncak Bukit Barisan serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia.

Banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam, bahkan sampai ke kaki pegunungan, yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk

pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjadi ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan pedagang. Akibatnya, dewi-dewi dari kahyangan merasa terganggu dan mencari tempat lain.

Saat itu Bukit Seguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tubuh di daerah itu. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu.

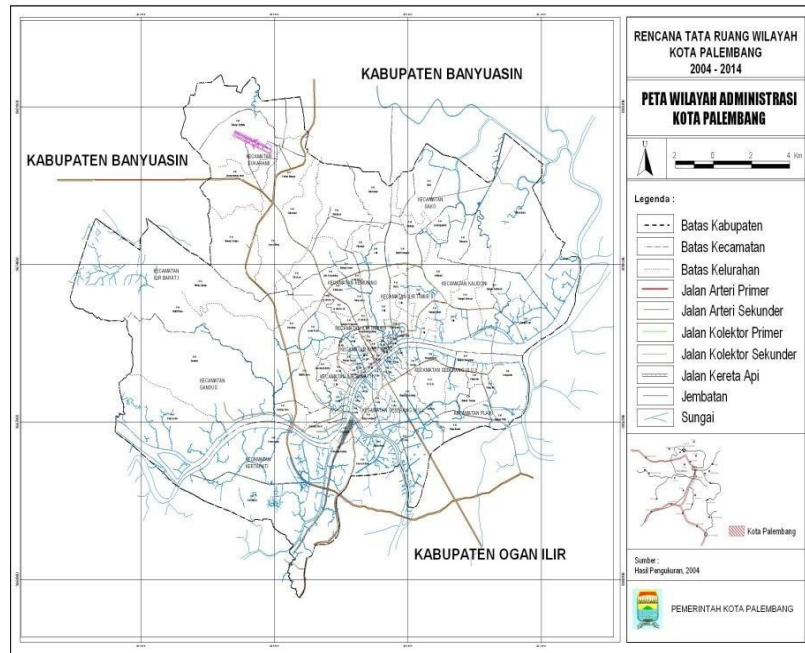
Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal. Kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai. Sungai Musi dan Sungai Musi Banyuasin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang.²⁶

²⁶Portal Resmi Pemerintah Palembang, <https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>, diakses tanggal 8 September 2019.

2. Lokasi dan Peta Kota Palembang

Berikut ini adalah Gambar Peta Kota Palembang :

Gambar 2.1.
Peta Kota Palembang



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari

Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.²⁷

3. Keadaan Geografis

Kota Palembang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² atau 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%). Perbatasan Wilayah Kota Palembang yaitu :

- a. Batas Utara : Kabupaten Banyuasin.
- b. Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin.
- c. Batas Timur : Kabupaten Banyuasin.

²⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Kota Palembang Dalam Angka*, Palembang : BPS Kota Palembang, h. 3.

- d. Batas Barat : Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.²⁸

Tabel 2.2
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Ilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu I	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79
8	Ilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil I	9,92	2,48
10	Ilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Ilir Timur II	10,82	2,71
13	Ilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-alang Lebar	34,58	8,63
Palembang		400,61	100,00

! Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

²⁸ *Ibid.*, h. 4.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%).²⁹

Tabel 2.3
Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Madya di Kota Palembang km 2017

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kotamadya
1	Ilir Barat II	2.50
2	Gandus	11.00
3	Seberang Ulu 1	4.50
4	Jakabaring	14.00
5	Kertapati	8.90
6	Seberang Ulu II	5.10
7	Plaju	8.30
8	Ilir Barat I	4.40
9	Bukit Kecil I	2.10
10	Ilir Timur I	3.90
11	Kemuning	6.90
12	Ilir Timur II	4.80
13	Ilir Timur III	7.00
14	Kalidoni	6.10
15	Sako	9.50
16	Sematang Borang	9.50

²⁹ *Ibid.*, h. 5

17	Sukarami	11.00
18	Alang-alang Lebar	13.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Berdasarkan jarak lokasi Kecamatan yang paling terdekat dengan Ibu Kota Madya di Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Bukit Kecil I dengan jarak 2,50 Km serta Kecamatan yang paling jauh dengan Ibu Kota Madya di Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Jakabaring dengan jarak 14,00 Km.³⁰

4. Data Pendudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur

³⁰ *Ibid.*, h. 7

I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/Km².³¹

B. Biografi Joko Widodo

1. Latar belakang dan Pendidikan Joko Widodo

Jokowi dilahirkan dengan nama lengkap Joko Widodo. Ia lahir di Surakarta, 21 Juni 1961. Ia merupakan Putera dari pasangan Noto Mihadjo dan Sudhiatmi dan anak sulung dari empat bersaudara. Joko Widodo satu-satunya anak laki-laki, adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya, Joko Widodo juga memiliki adik laki-laki namun meninggal ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi ialah Mulyono.

Mengenai perjalanan hidup Joko Widodo kita harus kembali ke masa kecil Jokowi, ia termasuk seorang anak yang berasal dari keluarga yang tergolong miskin menyebabkan Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras. Ayahnya adalah seorang penjual kayu dan bambu di Solo, hingga kelak beliau menjadi pengusaha mebel. Kehidupan Jokowi pun jauh sekali dari kemewahan. Laki-laki yang murah senyum tersebut mengatakan bahwa mereka pun pernah mengalami pahitnya kehidupan. Mulai dari masalah kesulitan untuk makan hingga kesulitan untuk membayar uang sekolah.

³¹ *Ibid.*, h. 70.

Gambaran keluarga orang tua Jokowi dulu cukup baik, kesulitan yang umumnya dialami keluarga miskin, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan makan dan kesulitan dalam hal pembayaran uang untuk biaya sekolahnya. Masa kecil Jokowi banyak dihabiskan di bantaran Karanganyar, banyak aktivitas bermainnya dilakukan sepanjang sungai, mandi, cari telur bebek, memancing ikan, bermain layang-layang, main sepak bola dan sebagainya. Meskipun demikian, Jokowi kecil juga tahu bagaimana mengatur waktunya kapan ia harus bermain kapan beliau harus belajar.

Sejak Jokowi mulai bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, menjadi seorang kuli panggul, ojek payung dan berdagang sudah ia lakoni sejak kecil hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Disaat teman-temannya yang lain bersekolah, ia lebih memilih untuk berjalan kaki. Kepandaiannya sebagai tukang kayu didapatnya dari ayahnya yaitu Noto Mihadjo, ketika Jokowi berusia 12 tahun ia sudah bekerja sebagai tukang gergaji. Lulus sekolah Dasar, ia kemudian masuk di SMP Negeri 1 Surakarta kemudian lulus dari sana ia melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta.

Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tingkat menengah atas, Jokowi melanjutkan kuliah ke jurusan Teknologi Kayu, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus tahun 1985. Saat menjadi mahasiswa, Jokowi muda sudah belajar hidup prihatin.

Prinsip hidup ini menjadi pengalaman berharga buat dirinya dalam berwirausaha. Kondisi yang miskin membuatnya terpacu untuk tetap bersemangat belajar dan cepat lulus.

Seorang Politikus biasanya berangkat dari menjadi aktivis, tapi Jokowi berbeda, semasa kuliah Jokowi lebih senang ikut kegiatan-kegiatan minat dan bakat seperti naik gunung, main basket dan sebagainya ketimbang sebagai aktivis. Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, tidak lama kemudian tahun 1986 Jokowi pun menikah dengan Irana, seorang gadis yang dipacarinya sejak masih kuliah dulu. Kini pasangan ini telah dikaruniai buah yang bernama Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu.³²

2. Masa Perjuangan Joko Widodo

Jokowi kemudian pada tahun itu juga ia mulai bekerja di Perusahaan Kertas BUMN bernama PT. Kraft Aceh, namun disana ia merasa tidak bedah sehingga memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Di Solo, yang pertama yang ia lakukan adalah bekerja di perusahaan milik pamannya, di CV Roda Jati, kemudian setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana.

Jokowi kemudian memberanikan diri untuk membuka usaha kayu sendiri dengan membuat badan usaha bernama CV. Rakabu pada tahun 1988 di bidang mebel kayu, nama badan usahanya terinspirasi

³² Biografi Joko Widodo, *Kisah Tukang Kayu Menjadi Presiden Indonesia*, <https://www.biografi.co>, diakses tanggal 24 September 2019.

dari nama Anak pertamanya yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi dibawah naungan CV. Rakabu mengalami pasang surut bahkan hampir kolaps atau bangkrut namun pada tahun 1990 berkat suntikan pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali.

Terjun ke dunia Politik Inspirasi mengenai kepemimpinan yang baik serta tata kota yang bersih serta rapi didapatnya dari hasil jalan-jalannya ke luar negeri berkeliling Eropa ketika ia berbisnis mebel. Kemudian tahun 2005, ia dicalonkan menjadi calon Walikota Solo oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, ia berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi walikota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai Walikota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia.

Kepemimpinan serta gebrakannya sebagai Walikota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai '**Spirit Of Java**', ia juga dikenal sebagai pemimpin '**blusukan**' yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Kota Solo menjadi kota yang nyaman, penataan kota, relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan, serta membuat Solo menjadi sebagai kota tuan rumah di acara Internasional adalah sebagian kecil dari prestasi Jokowi. Terbukti pula ia berhasil sekali lagi menjadi walikota solo pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dan dari situlah ia kemudian mulai dikenal rakyat karena

kesederhanaannya serta prestasi yang ditorehkannya.³³

Keberhasilan memimpin kota Solo kemudian membuat tokoh Golkar yang juga mantan wakil presiden Jusuf Kalla meminta Jokowi untuk maju menjadi ke Kursi Gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan kemudian Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. PDI perjuangan dan Partai Gerindra resmi mengusungnya pada tahun 2012 sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok.

Banyak pihak yang berpendapat pasangan Jokowi-Ahok sebagai pasangan Calon Gubernur yang tidak diunggulkan bahkan survei pun mengatakan demikian, namun yang terjadi pasangan Jokowi-Ahok berhasil mengumpulkan suara yang mengimbangi pasangan incumbent yaitu Fauzi Bowi dengan selisih suara yang tipis hingga akhirnya diadakan pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Akhirnya pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi-Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak yang menganggap bahwa strategi kampanye politik cerdas Jokowi sebagai keberhasilan Jokowi dalam memenangkan kursi gubernur.

Setelah ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia kemudian mencoba bekerja sesuai dengan yang ia janjikan saat kampanye dulu.

³³ Karier Joko Widodo sebagai Walikota, <https://id.wikipedia>, diakses pada tanggal 24 September 2019.

Perbaikan irigasi, penataan Pedagang Kaki Lima, hingga perbaikan transportasi yang menjadi masalah ibukota DKI Jakarta ia coba lakukan selain itu kebijakannya seperti pembuatan kartu jakarta sehat untuk kesehatan dan kartu Jakarta Pintar untuk pendidikan, perbaikan sistem transportasi, pengurangan nepotisme di birokrasi DKI Jakarta dengan sistem lelang jabatan. Meskipun banyak kalangan yang menilai yang dilakukan belum berhasil mengatasi permasalahan ibukota namun banyak warga DKI Jakarta merasa cukup puas dari kebijakan yang ia lakukan terhadap Jakarta.

Belum lama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan melalui mandat dari Megawati Soekarno Putri memberikan perintah agar Jokowi maju sebagai Calon Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014. Hal itu kemudian ia laksanakan, pengumuman Jokowi sebagai Calon Presiden Indonesia dilaksanakan di rumah Si Pitung dengan mencium Bendera Merah Putih. Kemudian deklarasi resmi Jokowi sebagai calon Presiden dilakukan di Gedung Juang 45, majunya ia sebagai Calon Presiden Indonesia didukung oleh empat partai pengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Kemudian pada bulan juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar

53,15% atau 70.997.833. Jokowi mengalahkan lawannya pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dengan perolehan suara 46,85% atau 62.576.444 adapun selisih suara antara Jokowi dan Prabowo sebesar 8.421.389 suara. Meskipun kemenangan itu di protes oleh pasangan Capres dari kubu Prabowo-Hatta Rajasa hingga kemudian menggugat perolehan suara, tersebut namun pada akhirnya Jokowi berhasil menduduki kursi sebagai orang nomor satu di Indonesia atau sebagai Presiden Ketujuh Republik Indonesia.³⁴

C. Program-program pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

1. Pemerintah sebagai Pelayanan Publik

Kewajiban sebuah Pemerintahan adalah melayani public, bukan melayanai kekuasaan. Pemerintahan yang melayani public sesuai dengan amanat konstitusi.³⁵

2. Blusukan dan Partisipasi Publik

Presiden Joko Widodo memajukan praktik partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mencari sosial pembangunan. Program-program sosial-ekonomi dari Pemerintah akan berjalan baik jika dimonitor dan dikritik bahkan diubah dengan menggalang

³⁴Biografi Joko Widodo, *Kisah Tukang Kayu Menjadi Presiden Indonesia*, <https://www.biografi.co>, diakses tanggal 24 September 2019.

³⁵ Eko Sulistyono (2019). *Jalan Kepemimpinan Jokowi (Jokoway)*, Jakarta : Moko Media, h. 50.

partisipasi publik agar masyarakat aktif dalam program yang ada.³⁶

3. Visi Trisakti dan Program Nawacita

Dalam tahun pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, ia berupaya membangun konsolidasi aparat pemerintahannya agar sesuai dengan visinya.

4. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Presiden Jokowi mempunyai strategi, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energy dan kelistrikan, pengelolaan sumber daya maritime serta pariwisata dan isndustri dalam kima tahun kedepan.³⁷

5. Membangun Fondasi Ekonomi

Sejak menerima mandate untuk memimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo konsisten memulai “jalan perubahan” untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pada tahun pertama Jokowi berhasil melakukan “transformasi fundamental ekonomi” guna membangun fondasi yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu :

Pertama, kebijakan politik yang mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi dengan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi yang lebih tepat. *Kedua* pembangunan infrastruktur, pada tahun 2015 dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp 290 triliun.

³⁶ *Ibid.*, h. 52.

³⁷ *Ibid.*, h. 64-65.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Perhubungan (kumuhub) adalah dua kementerian teknis yang memiliki portofolio pembangunan infrastruktur yang paling menonjol. *Ketiga*, memperkenalkan pembangunan berwawasan “Indonesia-sentris” untuk mendorong Pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa.

6. Menjaga Momentum Pertumbuhan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal 2016, Presiden Jokowi sudah melakukan penyerapan anggaran yang telah dilakukan di kuarter pertama dan lelang pra-DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bias dimulai di akhir tahun 2015.³⁸

7. Membuka Lapangan Kerja

Membuka lapangan kerja baru dan produktivitas pekerja adalah salah satu prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Pembukaan lapangan kerja akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga terjaganya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

8. Startegi Mengurangi Kemiskinan

Pemerintahan Presiden Jokowi mematok tingkat kemiskinan di kisaran angka 9%-10% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10.3% di APBN-P 2015. Berbagai program dan kebijakan sidudun tidak saja agar angka

³⁸ *Ibid.*, h. 71-85.

kemiskinan bias dikurangi, tapi juga adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak-hak ekonomi dan social masyarakat. Beberapa diantaranya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program sebelumnya.³⁹

³⁹ *Ibid.*, h. 93-102.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menggambarkan bagaimana Opini masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Bagaimana dampak dari Opini Masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Teori Kepuasan dari Christopher C. Heatwood dianggap peneliti mampu untuk menganalisa masalah yang timbul dikarenakan Bapak Presiden Joko Widodo banyak mengutarakan Janji-janji Politiknya pada saat kampanye berlangsung, tetapi sampai masa jabatannya berakhir janji-janji pada saat kampanye masih banyak yang belum terealisasikan.

A. Opini Masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Kota Palembang dari berbagai jenis profesi mengenai tentang Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peneliti telah mewawancarai secara langsung 10 (sepuluh) profesi dan mengambil sampel 2 (dua) sampel dari masing-masing profesi, jadi hasilnya ada 20 (dua puluh) informan yang peneliti wawancarai lewat tatap muka. Kepada masing-masing informan, peneliti memberikan 5 (lima) buah pertanyaan wawancara yang sama. Jawaban dari hasil wawancara dengan 20 (dua puluh) orang masyarakat Kota Palembang

tersebut telah peneliti susun untuk mempermudah proses analisis data. Pada tahap ini akan membahas tentang bagaimana Opini masyarakat Kota Palembang dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Inilah hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu).

1. Profesi TNI

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana Opinions dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial AS berusia 53 tahun: *“Terus terang saya tidak puas karena Pemerintahan ini, khususnya untuk kepresidenan Jokowi tidak tegas dalam bidang hukum, ekonomi, masyarakat tidak tegas itu aja.”*⁴⁰

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas karena semenjak masa Pemerintahan Presiden Jokowi di bidang hukum banyak persoalan yang tajam ke bawah tumpul ke atas, di bidang ekonomi biaya hidup masyarakat di Indonesia meningkat oleh kenaikan harga bahan pokok sehari-hari. Selanjutnya dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Menurut saya atas Pemerintahan Jokowi pertama itu tidak tegas kedua itu plinplan ketiganya itu banyak ngulur-ngulur waktu masalah ekonomi keamanan pembangunan hukum semuanya tidak jelas beda dengan kehidupan-kehidupan Presiden yang dulu, apa lagi untuk kesejahteraan rakyat sedangkan yang utama itu kesejahteraan masyarakat dan kehidupan masyarakat

⁴⁰ Inisial AS, Profesi TNI, di Markas Kodam II Sriwijaya Jalan Jendral Sudirman, wawancara tanggal 24 September 2019.

bukan kita menentukan kesejahteraan pribadi ataupun golongan tapi itu menurut pandangan saya.⁴¹

Dari pendapat di atas berhubungan dengan teori kepuasan dimana kepuasan itu bisa diukur dengan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan hidup itu harus diutamakan. Sementara itu keadaan Indonesia, beliau mengatakan: *“kondisi Indonesia saat ini menurut saya tidak jelas dalam segala hal dalam pemerintahan dalam hukum dalam ekonomi dalam pembangunan semuanya tidak jelas.”*⁴²

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kurangnya transparansi dalam kebijakan hukum dan ekonomi kepada masyarakat seolah-olah banyak hal yang ingin ditutupi oleh Pemerintah. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai TNI yang berinisial MT usia 43 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Beliau mengatakan:

Kalau bicara puas atau tidak puas pada saat Pemerintahan Pak Jokowi ini masih banyak kekurangannya ya dari segi ekonominya, ya namanya juga Pemerintahan itu tidak ada yang sempurna, tapi kalau dari saya pribadi saya sendiri merasa belum puas.⁴³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas karena dari segi ekonominya. Selanjutnya bagaimana dengan

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Inisial MT, Profesi TNI, di Markas Kodam II Sriwijaya Jalan Jendral Sudirman, wawancara tanggal 24 September 2019.

masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Sejak Pemerintahan Pak Jokowi ini menurut saya Pak Jokowi tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat bisa di lihat banyak rakyat-rakyat kecil itu yang merasa kesusahan ya karena itu tadi karena masalah ekonominya.”*⁴⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat karena banyak rakyat merasa kesusahan dari segi ekonomi. Sementara itu bagaimanakah dengan keadaan Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Kalau melihat keadaan Indonesia saat ini masih tidak stabil karena masih banyak masyarakat yang belum sejahterah.”*⁴⁵ Dari pendapat tersebut dapat di pahami bahwa keadaan Indonesia masih belum stabil.

2. Profesi Polisi

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial DA berusia 21 tahun: *“Tentu kami merasa puas, karena ada peningkatan lebih dari segi infrastruktur dari Pemerintahan yang sebelumnya, intinya banyak sekali perubahan yang dulunya tidak ada sekarang jadi ada maksudnya ada peningkatan.”*⁴⁶ Dari pendapat tersebut dapat di pahami ia merasa

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Inisial DA, Profesi Polisi, di Polda Kecamatan Kemuning Sumatera Selatan, wawancara tanggal 17 September 2019.

puas karena ada peningkatan dari infrastruktur dari Pemerintahan yang sebelumnya. Selanjutnya masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau mengatakan:

Selama masa Pemerintahan pada zaman Jokowi sekarang ya sudah terlihat bagus dibuktikan dengan infrastrukturnya sekarang sudah lebih berkembang karna Pemerintahan sebelumnya itu kurang berkembang tetapi memang masih ada yang harus diperbaiki misalnya masalah HAM dan masalah korupsi meskipun belum semua aspek terpenuhi saya rasa ini hal wajar karna memang sebelum masa Pemerintahan Jokowi pun masalah-masalah ini memang sudah menjadi sesuatu yang mengakar di Indonesia dan belum dapat diselesaikan oleh pimpinan-pimpinan kita tapi menurut saya Pemerintahan Bapak Jokowi tetap terlihat bagus.⁴⁷

Dari Pendapat di atas dapat dipahami bahwa selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah terlihat bagus dibuktikannya dengan pembangunan infrastruktur tapi ada yang masih harus diperbaiki contohnya masalah HAM dan masalah korupsi hal ini wajar karena belum dapat diselesaikan oleh pimpinan-pimpinan yang dulu. Sementara itu keadaan Indonesia:

Menurut saya sih keadaan Indonesia sekarang Indonesia tu lebih di hormatti di mata dunia karena ya sering ada kegiatan negara dunia di Indonesia ini bisa kita liat waktu itu Palembang sudah menjadi tuan rumah dengan adanya acara asian games jadi ya kayaknya Indonesia sekarang lebih di hormatti di mata dunia.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia sekarang sudah lebih dihormati di mata dunia karena ada kegiatan dunia seperti asean games Indonesia adalah salah satu tuan rumahnya. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Polisi yang berinisial E usia 53 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kalau dari bapak sendiri ya merasa Puas karena ada beberapa contoh pencapaian yang sudah bisa kita lihat seperti pembangunan infrastruktur, terus Pemerintah melakukan pembangunan secara merata bisa kita liat sampai ke plosok desa dan Pemerintahannya lebih transparan.⁴⁹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa puas karena sudah banyak pencapaian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi contohnya infrastruktur dan Pemerintah melakukan pembangunan secara merata dan Pemerintah lebih transparan. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Sistem Pemerintahannya ya bagus, cuman yang kebawahnya masih banyak berubah menseset kultusetnya masih banyak makai pola-pola lama sehingga perlu pengawasan secara komprehensif biar pelayanan publik itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan mudah.⁵⁰

Dari pendapat di atas dapat di pahami bahwa Sistem Pemerintahan Presiden Jokowi sudah baik namun dalam prakteknya belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya pengawasannya. Sementara itu keadaan Indonesia menurut Polisi: “*Kondisi Indonesia*

⁴⁹ Inisial E, Profesi Polisi, di Spn Betung, wawancara tanggal 20 September 2019.

⁵⁰ *Ibid.*,

saat ini ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia lebih maju lagi lebih transparan sehingga masyarakat bisa adil dan makmur dengan pembangunan-pembangunan yang merata yang berkeadilan secara menyeluruh."⁵¹ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia bisa lebih maju lagi sehingga masyarakat adil dan makmur dan melakukan pembangunan secara merata.

3. Profesi Dosen

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial YZ berusia 30 tahun:

Saya mungkin puas ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Jokowi masalah transparansi kita bisa liat misalnya kayak di akhir-akhir ini rekrutmen Pegawai Negeri Sipil itu kita bisa menemukan banyak orang yang lulus untuk menjadi PNS tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun dan sistemnya pun sudah sangat lebih bagus dibanding dengan sebelumnya, itu satu bidang yang saya merasa puas. Kepuasan lainnya terhadap kepemimpinan Jokowi itu ia memilih beberapa pembantunya dalam hal menteri sesuai dengan kompetensinya masing-masing misalnya dia memilih menteri keuangan dengan baik memilih menteri kelautan dengan baik walaupun juga ada beberapa menteri yang kita gak srek. Tapi disisi lain kita juga seneng dengan Jokowi bisa menunjuk pembantunya orang-orang yang punya berpotensi di bidangnya masing-masing.⁵²

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan Presiden Jokowi sangat transparan dalam hal rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang masuk tanpa mengeluarkan biaya apapun dan masa

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Inisial YZ, Profesi Dosen, di UIN Raden Fatah Palembang, wawancara tanggal 19 September 2019.

Pemerintahan Jokowi tepat sasaran dalam memilih menteri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya bagaimana masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Sistem Pemerintahan Jokowi saya puas saya anggap Pemerintahannya cukup baik walaupun masih ada kritikan-kritikan ada hal-hal yang bikin kita ga puas karna dibanding Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yang paling penting itu Pemerintahan itu lebih transparan aja dan banyak hal yang bisa diselesaikan oleh Jokowi salah satunya misalnya merapikan ataupun mencoba untuk membenahi reformasi birokrasi yang ada di Indonesia, jadi reformasi birokrasi itu sudah lebih bagus dibandingkan dengan Pemerintah sebelumnya.⁵³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan Jokowi lebih transparasi dan Pemerintah Presiden Jokowi mampu memperbaiki lebih baik dari sebelumnya reformasi yang ada di Indoensia. Sementara itu kondisi Indonesia pada saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kondisi Indonesia saat ini yang pastinya secara umum cukup stabil hanya saja memang ada beberapa permasalahan misalnya kayak kemarin rupiah melemah di akhir-akhir kepemimpinan Jokowi terus juga banyak muncul politisasi identitas sebenarnya yang sangat menyedot banyak perhatian misalnya di 2014-2019 itu banyak sekali serangan-serangan isu ras, golongan, agama yang ikut terkait dengan politik ataupun yang tidak terkait dengan politik terus juga banyak bencana tapi mampu diatasi dengan baik oleh Presiden Jokowi misalnya kemarin ada tsunami di palu itu lumayan cepat penanganannya dan kalau ditanyakan kondisinya ya cukup stabil sebenarnya kondisi Indonesia terus juga kalau saya lihat-lihat secara pribadi kondisi perekonomian juga tidak mengkhawatir banget masih dalam aman hanya saja memang ada permasalahan politik menjelang tahun 2019 itu memang suasana politik di Indonesia agak memanas itu saja yang saya amanti karna memang ada isu identitas agama yang membuat keruh dan membuat masyarakat

⁵³ *Ibid.*,

itu merasa dipertontonkan dengan hal-hal yang sangat memalukan dan pro antara golongan dan kelompok agama segala macam tapi secara umum kondisi indonesia 2014-2019 bagus menurut saya.⁵⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Kondisi Indonesia saat ini sudah begitu baik dalam masa Pemerintahannya pada tahun 2014-2019 walaupun sempat terjadinya mata rupiah melemah tapi sejauh ini dapat di tanggulangi oleh Pemerintah Jokowi dengan baik dan sikap cepat dan tanggap masa Pemerintahan Presiden Jokowi terbukti saat tsunami di Palu dapat ditanggulangi secara baik dan maksimal. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Dosen yang berinisial WS usia 45 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang puas atau tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kalau berbicara puas atau tidak puasnya saya sih belum puas karena ya kita sebagai masyarakat menginginkan yang lebih baik karena masyarakat itu selalu menuntut tentang pelayanan contohnya saja membuat KTP bisa kita liat kalau membuat KTP itu bisa sampe betahun-tahun. Apalagi banyak pengeluaran yang harus dibayar tiap bulannya contohnya saja BPJS, listrik, air, kebutuhan sehari-hari itu tiap bulannya sudah harus mengeluarkan uang berapa coba, kalau pegawai tetep yah agak enak dia ada gaji tetap, kalau orang-orang yang ngak punya gaji tetap itu gimana coba kan kasian lihatnya.⁵⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas karena sebagai masyarakat menginginkan yang terbaik dan

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Inisial WS, Profesi Dosen, di UIN Raden Fatah Palembang, wawancara tanggal 1 Oktober 2019.

masyarakat selalu menuntut pelayanan. Sedangkan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut profesi Dosen:

Masa Pemerintahannya tu kalau di bidang pendidikan ya dari segi kurikulum sudah berubah di tahun 2013 dan tidak berjalan dengan lancar, tentunya kurikulum 2013 itu baru dibuat dan bisa disosialisasikan secara efektif itu di tahun 2014-2015 sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi itu terkait dengan buku, jadi buku-buku yang telah dibuat oleh Pemerintah itu kan seharusnya dicetak tapi sampai sekarang masih belum dicetak.⁵⁶

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi di bidang pendidikan mengenai kurikulum tidak berjalan dengan lancar. Sementara itu bagaimanakah keadaan Indonesia sekarang menurut selaku Dosen: *“Kalau melihat keadaan Indonesia sejak Pemerintahan Jokowi kalau di lihat dari ekonomi kita itu tidak stabil, dari segi keamanan itu masih tidak stabil buktinya saja masih banyak yang demo, intinya keadaan Indonesia sekarang ini masih belum kondusif.”*⁵⁷ Dari pendapat berikut dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia dari segi perekonomian dan keamanan tidak stabil.

4. Profesi Guru

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial SW berusia 42 tahun:

Saya merasa puas karena adanya Pemerataan kalau seperti di kantor itu dana-dana pengeluaran yang menggunakan uang khas Negara misalnya adanya tur-tur keluar negeri apa kemana

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*

gitu itu semuanya kalau masa Pemerintahan Pak Jokowi itu semuanya di pangkas dan setelah itu kehidupan yang di harus dipatut dari Presiden kita itu ya sederhana, keluarganya juga sederhana. Pak Jokowi itu tidak sering menggunakan fasilitas Negara walaupun dia sekarang berkuasa.⁵⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa puas karena masa Pemerintahan Jokowi tegas dalam memangkas dana-dana pengeluaran uang kas ke Negara untuk kunjungan keluar negeri bagi aparatur Negara yang tidak terlalu penting dan dalam kehidupan Jokowi patut di jadikan panutan karena seorang. Selanjutnya Bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Pemerintahannya itu kalau di bidang pendidikan ya sudah bagus sudah lumayan dari tingkat SD SMP sampai ke tingkat kuliah, apalagi kalau di liat dari segi infrastruktur sudah banyak kemajuannya pembangunan pun sudah merata.”*⁵⁹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang pendidikan Presiden Joko Widodo menanganinya dengan serius segingga bidang pendidikan dari SD SMP SMA bahkan kuliah sudah ada regulasinya dengan baik dan infrastruktur di zaman Pemerintahan Jokowi sangat maju dibanding masa Pemerintahan sebelumnya. Sedangkan kondisi Indonesia ialah: *“Kondisi Indonesia sekarang ya namanya kami sebagai guru kalau diliat di Palembang ya kondusif kalau di luar*

⁵⁸Inisial SW, Profesi Guru, di SD Negeri 149 Palembang, wawancara tanggal 23 September 2019.

⁵⁹ *Ibid.*,

Palembang ya ga tau karena lingkup Indonesia kan banyak, kalau menurut saya sih stabil-stabil aja masih dalam keadaan kondusif.”⁶⁰

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah cukup baik khususnya di Kota Palembang. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Guru usia yang berinisial A usia 25 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang puas atau tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

kalau saya ini merasa puas dengan Pemerintahan Jokowi karena setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden itu contohnya di Palembang tempat saya tinggal ini kemajuannya begitu pesat dengan adanya LRT setelah itu jalan tol ada dimana-mana dan itu mempercepat transportasi dan menurut saya perekonomian setelah Pemerintahan Jokowi itu meningkat jadi menurut saya ya lebih puaslah daripada Pemerintahan yang sebelumnya.⁶¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa puas karena khususnya di Kota Palembang infrastrukturnya sudah maju. Sedangkan kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut profesi Guru: *“Selama masa Pemerintahan Presiden Jokowi ya cukup baik yang namanya Pemerintah dan Presiden itu memberikan yang terbaik kan untuk negara ini jadi keadaan Indonesia ini stabil-stabil aja malah lebih maju dibandingkan yang dulu.”⁶²*

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Inisial A, Profesi Guru, di SMA Negeri 14 Palembang, wawancara tanggal 24 September 2019.

⁶² *Ibid.*,

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat memperbaiki keadaan di Indonesia lebih baik dari masa Pemerintahan sebelumnya. Sedangkan kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah:

Kondisi Indonesia saat ini aman dan baik menurut saya karena Indonesia sekarang ini lebih maju contohnya di Papua saja sudah ada jalan tol bukan di Papua saja sih dimana-mana sudah ada jalan tol, LRT terut di Jakarta itu malah sudah ada MRT kita itu sudah hampir sama dengan negara luar negeri karena kan dulu sebelum masa Pemerintahan Jokowi MRT itu kan pembangunannya terhenti dan setelah masa Jokowi selesai dan dia bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi menurut saya keadaan Indonesia saat ini lebih baik lagi dari pemimpin yang sebelumnya karena fasilitasnya bertambah.⁶³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia saat Pemerintahan Jokowi sudah membangun jalan tol di Papua yang sebelumnya tidak dilakukan oleh masa Pemerintahan sebelumnya bahkan di Palembang sudah dibangun LRT dan di Jakarta sudah dibangun MRT karena Presiden Jokowi ingin menyamakan infrastruktur Indonesia dengan Negara maju lainnya.

5. Profesi Pengusaha

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial MHS berusia 28 tahun:

Saya merasa puas, karena banyak hal yang bisa bikin saya merasa puas contohnya salah satunya di daerah orang tua saya

⁶³ *Ibid.*,

di oki, sejak zaman Jokowi yang bisa buat program listrik masuk ke dalam desa, terus sejak zaman Jokowi sejak dari saya lahir jalan itu nggak pernah diperbaiki lalu sekarang boleh di liat setiap desa hampir merata jalannya sudah pakai coran. Setelah itu mengenai perizinan itu lebih mudah contohnya saya kemarin mengurus pindahan adik saya ke Bali sekarang tidak ribet lagi, ngurusnya langsung ke kecamatan jadi prosesnya tidak lebih banyak, beda dengan dulu harus ke RT ke RW kalau dulu lebih ribet berbeda dengan sekarang, kalau sekarang prosesnya lebih cepat. dan kalau sekarang ini banyak tanah-tanah masyarakat itu dari dulu tidak pernah besertifikat sekarang besertifikat gratis, karena kalau zaman dulu mengurus sertifikat itu sangat ribet dan biaya lebih besar kalau sekarang urusannya lebih mudah, jadi kita ya berterimakasih untuk ini semoga kedepan bisa lebih baik lagi.⁶⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa puas karena sejak zaman Jokowi kebanyakan disetiap jalan yang berada di daerah dusun sudah diperbaiki dan program listrik sudah masuk ke dalam desa. Mengenai perizinan seperti mengurus pindahan rumah sekarang lebih mudah dan prosesnya cepat dibanding dengan yang dulu apalagi sekarang mengurus sertifikat itu gratis seperti sertifikat tanah. Selanjutnya Bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo kalau di bilang tidak bagus tentu lebih sudah bagus dari yang sebelumnya, kalau di bilang bagus belum terlalu sempurna masih ada yang harus diperbaiki salah satunya mungkin yang namanya Presiden kan tidak bisa kerja sendiri jadi masih ada faktor terpengaruh oleh desakan-desakan orang lain tetapi itu jauh lebih baik dibanding era sebelumnya.⁶⁵

2019 ⁶⁴ Inisial MHS, Profesi Pengusaha, di daerah sekip, wawancara tanggal 12 September

⁶⁵ *Ibid.*,

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Tetapi masih ada yang harus diperbaiki salah satunya masih ada faktor terpengaruh oleh desakan-desakan orang lain. Sedangkan kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah:

Kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi karena perkembangan teknologi terlalu cepat jadi yang jelek bisa tambah jelek informasinya cepat diketahui. Sejak kepemimpinan Jokowi semua administrasi seperti pengurusan pindah intinya pengurusan-pengurusan sekarang lebih cepat dibanding yang dulu karena yang dulu lebih susah birokrasinya apalagi dinotaris administrasi lebih cepat, untuk pengusaha buat dapat izin usaha lebih cepat, apalagi untuk buat sertifikat rumah banyak program bagi yang tidak mampu bisa membuat sertifikat, kemajuannya sudah lebih banyak dari yang sebelumnya.⁶⁶

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo perkembangan teknologi itu sudah semakin cepat. Sejak kepemimpinan Jokowi semua urusan administrasi lebih cepat dibanding yang dulu karena yang dulu lebih susah birokrasinya. Untuk pengusaha buat dapat izin usaha lebih cepat, kemajuannya sudah lebih banyak dari yang sebelumnya. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Pengusaha yang berinisial CS usia 51 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang puas atau tidak puas dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

⁶⁶ *Ibid.*,

Ya jelas kalau menurut bapak puas karena apa yang dilaksanakan dan direncanakan oleh Presiden itu dapat terlaksana sesuai dengan kehendak dari masyarakat contohnya yang selama ini mengurus sertifikat rumah sampai waktu lama kadang-kadang tidak selesai nah semenjak Pemerintahan Jokowi ini prosesnya jelas waktunya tidak lama dan tuntas tidak menggunakan uang juga jadi setoran sesuai dengan apa yang di setor di bank artinya tidak dipungut dengan yang lain-lain itu pemunguttan resmi namanya tapi melalui bank, jadi terbuka teratus bisa dipertanggung jawabkan.⁶⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk mengurus sertifikat rumah sekarang lebih mudah di bandingkan dengan Pemerintahan yang dulu karena sekarang lebih cepat dan tidak mengeluarkan uang sedikitpun. Sedangkan bagaimana masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kalau menurut bapak ya bagus karena yang pertama itu banyak pengalaman-pengalaman yang selama ini harga minyak di daerah Indonesia Timur khususnya di Jaya Pura itu harganya melebihi dari harga Indonesia bagian Tengah dan bagian Barat nah saat ini sejak kepemimpinan Jokowi ini harga minyak sama antara Sumatera dan Jawa itu sama jadi artinya itu ada pemerataan pembangunan disana. Kemudian ada lagi contoh di daerah perbatasan antara Indonesia bagian Timur di daerah Timur-Timur nah semenjak kepemimpinan Jokowi itu di bangun daerah perbatasan sehingga pembangunan itu bisa di buktikan bisa di lihat dari warga Negara Timur Leste dan warga Negara Indonesia itu di segi Pembangunannya.⁶⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa sejak Pemerintahan Jokowi harga minyak di papua itu sama dengan harga minyak yang ada di wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia

⁶⁷ Inisial CS, Profesi Pengusaha, di Kecamatan Kemuning, wawancara tanggal 1 Oktober 2019.

⁶⁸ *Ibid.*,

sehingga pemerataan harga minyak di Indonesia sudah baik. Sementara itu keadaan Indonesia sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Sejak Pemerintahan Jokowi keadaan Indonesia ya bagus masalahnya banyak isu-isu yang negatif ini jadi kebanyakan berita bohong jadi yang sebenarnya isu itu diangkat orang yang katakanlah bukan pro Jokowi yang bukan pro Jokowi ya mungkin banyak macam-macam, kalau yang pro Jokowi ya baik. Setelah itu di lihat dari ekonomi ya harga masih bisa terjangkau.⁶⁹

Dari tanggapan di atas dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia sejak Pemerintahan Presiden Jokowi isu-isu negatif yang diangkat adalah isu-isu yang tidak pro dengan Jokowi dan untuk masalah ekonomi bisa terjangkau.

6. Profesi Satpam

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial ED berusia 42 tahun:

Pendapat saya pribadi saya tidak puas, karena bisa kita liat untuk rakyat kecil sangat terasa terutama masalah ekonomi harga-harga pada melonjak semua tidak tentu terkadang naik terkadang turun tapi kebanyakan naik, tapi kalau masalah pembangunan ya memang saya akui terutama infrastruktur, terutama di pedalaman dengan adanya transportasi, memang benar tujuannya untuk mempermudah dari desa untuk ke kota. Kalau untuk umum ya itu tadi rakyat tu merasa ekonominya itu agak sulit soalnya harga bahan pokok itu tidak stabil pada umumnya pada naik.⁷⁰

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas dikarenakan masalah ekonomi harga-harga sudah pada melonjak

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Inisial ED, Profesi Satpam, di UNSRI Bukit, wawancara tanggal 16 September 2019

semua tapi kalau masalah pembangunan terutama infrastruktur khususnya untuk pendalaman dengan adanya transportasi lebih memudahkan tujuan, tetapi kalau untuk umum rakyat-rakyat kecil merasakan ekonominya sangat sulit. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut saya pribadi memang lebih bagus dari Pemerintahan yang sebelumnya, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki khususnya masalah ekonomi.”*⁷¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih bagus dari Pemerintahan yang sebelumnya, tapi masih banyak yang harus diperbaiki khususnya masalah ekonomi. Sedangkan kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kalau keadaan Indonesia sekarang iya stabil aja ngak ada gejolak, terutama model gejolak keamanan ya aman-aman aja, yang pada ribut tu pimpinan yang di atas yang saling merebut kekuasaan terutama kalau kita sering nonton tv yang banyak ribut itu kan orang-orang pimpinan yang di atas.⁷²

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia sekarang stabil tidak ada gejolak terutama tentang keamanan terkondisi aman, tetapi orang-orang pimpinan di atas selalu ribut. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai satpam yang berinisial RP usia 29 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang bagaimana opini

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

masyarakat dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Saya merasa tidak puas karena masalah ekonomi sampai sekarang masih terpuruk juga apa-apa barang mahal listrik naik dan menurut saya beliau itu kurang mendengarkan aspirasi masyarakat kecil kurang meliat ke arah masyarakat kecil.”*⁷³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia tidak merasa puas karena masalah ekonomi masih terpuruk terutama listrik naik dan Presiden Jokowi kurang mendengarkan aspirasi masyarakat kecil. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Masa Pemerintahan di era Jokowi untuk sekarang ini memang ada kemajuannya dibanding era Pemerintahan yang dulu dalam bidang infrastrukturnya memang banyak pembangunan-pembangunan yang sudah tercapai. Tetapi banyak juga masyarakat yang mengeluh akan kemahalan harga-harga BBM yang semakin menjolak tinggi harganya.⁷⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan di era Jokowi ada kemajuan dibanding era Pemerintahan sebelumnya, dalam bidang infrastruktur banyak pembangunan-pembangunan yang sudah tercapai, tapi masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan harga BBM yang harganya semakin menjolak tinggi.

Sementara itu kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut profesi Satpam, beliau

⁷³Inisial RP, Profesi Satpam, di SMA Negeri 14 Palembang, wawancara tanggal 16 September 2019.

⁷⁴ *Ibid.*,

mengatakan: *“Kondisi Indosenia saat ini menurut saya kurang baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengeluh akan kemahalan harga bahan pokok.”*⁷⁵ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia saat ini kurang baik karena banyak masyarakat mengeluh dengan kemahalan harga bahan pokok.

7. Profesi Pegawai Swasta

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial PD berusia 23 tahun: *“Saya merasa tidak puas karena sari segi kebijakan banyak yang membingungkan dan menurut saya Bapak Jokowi lebih berpihak ke kaum atas ke golongan-golongan tertentu dibandingkan dengan golongan kecil.”*⁷⁶

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas karena kebijakan Jokowi masih membingungkan dan Jokowi lebih berpihak ke kaum atas dibandingkan dengan golongan kecil. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Preisden Joko Widodo menurut Pegawai Swasta: *“Dari keseluruhan dari segi cara beliau memerintah ya cukup bagus sih ya seperti dari sudut infrastruktur ya emang labih maju tapi kelemahannya lebih berpihak*

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Inisial PD, Profesi Pegawai Swasta, di PT Raja Wali Suka Bangun, wawancara tanggal 17 September 2019.

dengan kaum-kaum tertentu seperti partai atau golongan-golongan yang tinggi.”⁷⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa cara Jokowi memerintah cukup bagus dari sudut infrastruktur lebih maju kelemahannya lebih berpihak dengan kaum-kaum atas. Sedangkan kondisi Indonesia saat ini menurut Pegawai Swasta ialah: *“Kalau menurut saya sih cukup berkembang dari segi teknologi, infrastruktur dibanding era sebelumnya.”⁷⁸*

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia sudah berkembang dari segi teknologi dan infrastruktur dibanding era sebelumnya. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Pegawai Swata yang berinisial IR usia 22 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang puas atau tidak terhadap Pemerintahan Preisden Joko Widodo:

Tidak puas saya melihat emang ada beberapa kebijakan yang membuat kita itu agak kecewa dengan Jokowi misalnya banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh Jokowi misalnya Jokowi tidak bisa menyelesaikan kasus kesulitan munir, bahwa menurut saya Jokowi itu salah satu Presiden yang tidak punya kekuatan untuk menembus ruang-ruang politis elit yang ada di pusat.⁷⁹

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas karena banyak kasus-kasus HAM yang belm bisa dipecahkan,

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Inisial IR, Profesi Pegawai Swasta , di PT Raja Wali Suka Bangun, wawancara tanggal 17 September 2019.

seperti kasus munir ini membuktikan Pemerintahan Jokowi sama saja seperti Pemerintahan sebelumnya yang tidak bisa memecahkan kasus HAM. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Preisden Joko Widodo menurut Profesi Pegawai Swasta:

Kalau menurut saya masa Pemerintahan Jokowi ini masih kurang ya karena masih terdapat oknum-oknum dari Pemerintah yang tidak bertanggung jawab ya seperti birokrasi yang berbelit-belit pengurusan izin yang berbelit-belit kemudian dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lainnya kurang.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa di masa Pemerintahan Jokowi banyak oknum-oknum di dinas Pemerintahan yang menyulitkan masyarakat dalam urusan perizinan, serta dalam pelayanan kesehatannya juga kurang. Sedangkan kondisi Indonesia saat ini menurut Pegawai Swasta: *“Kalau melihat keadaan Indonesia sejak Kepemimpinan Presiden Jokowi saya liat masih sering ribut-ribut ya kalau kita sering nonton tv itu orang-orang Politik itu masih suka ribut-ribut”*. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia orang-orang Politik itu masih suka ribut.

8. Profesi Pedagang

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial SM berusia 38 tahun:

Kalau bagi saya tidak puas, jadi saya itu belum merasa sejahterah karena apalagi sekarang ini sembako semakin naik yah serba kekuranganlah segala apapun itu jangan dimahalli saya sebagai rakyat kecil yang hanya menjual sayur di pasar kalau keadaan seperti ini apa-apa mahal ya cuma-cuma saja 2

bulan naik kemudian turun lagi dan satu bulan naik lagi dan sementara harga pasar tidak bisa mendeklarkan kalau bisa jangan dimahallin.⁸⁰

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa berhubungan dengan teori kepuasan ia merasa tidak puas maka hidupnya pun tidak sejahterah. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut pedagang yang berinisial SM, beliau mengatakan:

Kalau yang saya liat sekarang sih kebanyakan masyarakat itu mengeluh ya itu tadi perekonomian kita belum begitu baik belum begitu pulih terus yang dolar juga kan kemarin sempat harga-harga naik, menurut saya ya itu dulu yang harus diperbaiki perekonomian kita dulu soalnya kesian rakyat-rakyat kecil jugakan mau beli apa-apa jadinya susah jadi menurut saya selama masa Pemerintahan beliau masih banyak kekurangannya yang harus diperbaiki lagi.⁸¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan Jokowi menyulitkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena banyak harga-harga naik yang sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Sementara itu kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kondisi yang terjadi di Indonesia ini Pemerintahannya itu tidak terlalu menanggapi apa yang terjadi dengan rakyat harapan saya Pemerintah bisa menanggapi kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang biar kita juga yang sudah memilih beliau tidak dikecewakan.⁸²

⁸⁰ Inisial SM, Profesi Pedagang, di Pasar Perumnas Sako, wawancara tanggal 18 September 2019.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*,

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Pemerintahan Joko Widodo tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Pedagang yang berinisial RS usia 22 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang puas atau tidak terhadap Pemerintahan Preside Joko Widodo:

Menurut saya pribadi saya tidak puas dalam Pemerintahan Pak Jokowi dikarenakan masih banyak kekurangan di bidang perekonomian di bidang perindustrian saya selaku pedagang merasakan bagaimana sistem perekonomian atau perdagangan di Indonesia ini masih banyak yang kurang dari hal sistem-sistem apa yang dari hal pertanian, perikanan maupun perindustrian karena menurut saya itu hal yang paling penting untuk membangun hal Indonesia itu semakin maju.⁸³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa tidak puas karena banyak kekurangan di bidang perekonomian dan perindustrian karena hal itu sangat penting untuk membangun Indonesia semakin maju. Sedangkan masa Pemerintahan Presiden Joko Wododo, beliau mengatakan:

Menurut saya bisa dikatakan cukuplah karena dalam hal kepemimpinan itu ya pasti ada kekuranganlah tapi ya menurut saya masih cukup tapi masih banyak kekurangan yang harus dibenahi ataupun diperbaiki karena dalam sistem kepemimpinan Pak Joko Widodo dalam hal untuk memberikan saran susah untuk membangun Indonesia lebih maju.⁸⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih ada kekurangan dan masih ada yang harus diperbaiki. Sementara itu bagaimanakah kondisi Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

⁸³ Inisial RS, Profesi Pedagang, di pasar sekip, wawancara tanggal 1 Oktober 2019.

⁸⁴ *Ibid.*,

Keadaan Indonesia ini bisa dikatakan walaupun dari hal masyarakatnya cukup tenang walaupun dari mahasiswa dan lain-lain mungkin banyak yang lagi isu-isu yang lagi beredar dan masih banyak guncangan dinamika yang ada Pemerintahan Pak Jokowi karena penglihatan saya pribadi Jokowi itu lebih condong bisa memberikan suatu omongan saja tapi tidak ada memberi kesejahteraan bagi masyarakat.⁸⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia masih banyak guncangan dinamika yang ada di Pemerintahan dan banyak janji-janji yang tidak ditepati oleh Presiden Joko Widodo.

9. Profesi Buruh

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial BS berusia 44 tahun:

Ya puaslah sangat puas lihat itu jalan-jalan infrastruktur itu dimana-mana ada sumatera sampai ke lampung itu sudah jalan tol setelah itu bedungan ada dimana-mana, selain infrastruktur ekonomi kita bagus harga-harga pangan itu stabil yang tidak puas ya ga ada sih bagus semua itu.⁸⁶

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ia merasa sangat puas karena infrastruktur berkembang dan harga ekonomi stabil. Selanjutnya bagaimana dengan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Masa Pemerintahan Jokowi menurut saya dari segi keamanannya bagus dari segi infrastrukturnya bagus dari segi ekonomi mungkin belum 100% lah dari segi hukum masih 80% penyebabnya dari aparat-aparat penegak hukum itu kadang-kadang masih banyak yang bisa disuap gitu jadi belum terlihat

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Inisial BS, Profesi Buruh, di Kecamatan Sako, wawancara tanggal 20 September 2019.

bagus ya pokoknya ada peningkatanlah dari zaman-zaman dulu itu.⁸⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak yang terlihat bagus tetapi dari segi hukum masih belum karena aparat-aparat hukum masih bisa di sogok. Sementara itu keadaan Indonesia menurut profesi buruh, dia mengatakan:

Keadaan di Indonesia ya bagus aman-aman lancar ga ada masalah kalau ada masalah-masalah sedikit ya itu wajar aja namanya Pemerintahan bukan mungkin 100% benar pasti ada kekurangan sedikit-sedikit itu kan, kalau kita liat dari keseluruhan Indonesia ya selama ini bagus itu tidak mengecewakan.⁸⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Indonesia tidak terjadi apa-apa selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Buruh yang berinisial MA usia 34 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya tentang opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo: "*Saya tidak merasa puas karena banyak kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak sesuai dengan kehidupan saya.*"⁸⁹ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa banyak kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang tidak sesuai. Selanjutnya bagaimana pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut profesi Buruh:

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Inisial MA, Profesi Buruh, di Kecamatan Kalidoni, wawancara tanggal 20 September 2019.

Menurut saya pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dalam hal infrastruktur tapi dalam melakukan infrastruktur tersebut Pak Jokowi kurang memperhatikan dampak atau akibat dari infrastruktur tersebut, banyak masyarakat-masyarakat kecil yang tergusur akibat dari infrastruktur tersebut dan tidak di pikirkan oleh Presiden Joko Widodo.⁹⁰

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa di masa Pemerintahan Presiden Jokowi infrastruktur sangat di tingkatkan, namun tidak sebanding dengan efeknya, Presiden Jokowi tidak memikirkan masyarakat yang terkena gusur akibat infrastruktur yang di bangunnya. Sementara itu bagaimana keadaan Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Menurut saya kalau kondisi Indonesia saat ini dalam hal infrastruktur boleh di ajukan jempol karena banyak infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo namun kita lihat di sisi lain ada hal yang tidak dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo seperti nilai rupiah yang kemarin sempat turun banyak masyarakat yang merasa bertahan hidup di Indonesia itu susah karena banyaknya bahan pokok atau tagihan-tagihan listrik air maupun yang lainnya itu sudah naik secara ekonomi Indonesia masih belum begitu baik dari masa Pemerintahan sebelumnya.⁹¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa infrastruktur bisa dikatakan sangat maju di Pemerintahan Presiden Jokowi, tapi harga listrik air juga ikut meningkat di era Pemerintahan Jokowi dan pernah saat era Jokowi nilai ruiah menurun.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

10. Profesi Petani

Pertanyaan yang telah peneliti ajukan mengenai bagaimana opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada informan yang berinisial SR berusia 41 tahun: *“Tidak puas, karena saya tidak merasa sejahterah karena kan kepuasan itu bisa di lihat dari kesejahteraannya, karena yang saya rasakan petani itu masih menjadi pihak yang lemah, maksudnya itu lemah dalam perekonomiannya karena perekonomian sekarang sulit jadi susah untuk meningkatkan taraf hidup saya dan keluarga saya.”*⁹³

Dari pendapat di atas berhubungan dengan terori kepuasan bahwa kepuasan itu dapat di ukur dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan beliau mengatakan tidak puas maka beliau belum merasa sejahtera. Sedangkan bagaimana masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut Petani: *“Menurut saya Pemerintahan sekaramg ini masih kurang dan masih banyak yang harus di perbaiki hampir keseluruhan, bagi saya selama Pak Jokowi memimpin Petani itu masih belum sejahterah.”*⁹⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Petani merasa tidak ada efek positif atau lebih baik semenjak Pemerintahan Jokowi berkuasa. Sementara itu bagaimanakah kondisi Indonesia sejak masa

⁹³ Inisial SR, Profesi Petani, di Kecamatan Kalidoni, wawancara tanggal 26 September 2019.

⁹⁴ *Ibid.*,

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut profesi Petani yang berinisial SR:

Kondisi Indonesia sekarang ini menurut saya pribadi ya belum berkembang maksudnya itu belum maju dan semakin terpuruk apalagi untuk para petani seperti saya ini karena ya bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu melambat dan barang-barang pada mahal semua, jadi menurut saya keadaan Indonesia sekarang belum berkembang.⁹⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia semenjak Presiden Jokowi semakin terpuruk karena di bidang ekonomi barang-barang kebutuhan pokok semakin mahal. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Petani yang berinisial SY usia 57 tahun. Peneliti menanyakan pendapatnya opininya dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo :

Saya tidak puas karena saya sebagai petani ini yang ada saya makin susah sejak Pemerintahan yang sekarang, karena sekarang apa-apa mahal untuk nanam sayur itu seperti harga pupuk harga racun belum lagi bayaran yang lain seperti listrik sudah pada naik semua.⁹⁶

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa sejak Pemerintahan Jokowi Petani merasakan kesusahan karena harga kebutuhan untuk Petani meningkat. Sedangkan bagaimana masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Sejak Pemerintahan Jokowi ini ya kalo menurut saya pribadi Pemerintah sekarang ini hanya mementingkan orang-orang yang di atas, rakyat kecil tidak di perhatikan contohnya saja jalan tol itu di bangun itu kan hanya untuk orang-orang yang di

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Inisial SY, Profesi Petani, di Kecamatan Kalidoni, wawancara tanggal 27 September 2019.

atas aja yang punya kendaraan mobil, sedangkan untuk rakyat kecil apa yang sudah dilakukan Pemerintah saya ga tau.⁹⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi hanya mementingkan kepentingan orang kaya saja tanpa memikirkan masyarakat kecil. Sementara itu bagaimana kondisi Indonesia menurut profesi sebagai Petani yang berinisial SY: *keadaan Indonesia sekarang ya menurut sata memperhatikan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang ini melemah, mending Pemerintahan yang dulu di banding dengan yang sekarang.*” Dari pendapat berikut dapat dipahami bahwa keadaan Indonesia memprihatikan karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah melemah.⁹⁸

Dari keseluruhan pernyataan di atas mengenai tingkat kepuasan masyarakat kota Palembang terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat disimpulkan bahwa dari 20 informan menganggap bahwa 12 informan menyatakan tidak puas akan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa periode 2014-2019, karena Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat yang merasa tidak puas dikarenakan adanya permasalahan di Indonesia dari segi ekonomi mengalami penurunan, dan harga bahan pokok di Indonesia melonjak tinggi membuat masyarakat terbebani dan merasa tidak sejahtera, masyarakat beranggapan bahwa

⁹⁷*Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*,

Presiden Joko Widodo kurang mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat kecil.

Sedangkan ada 8 informan yang merasa puas dikarenakan oleh adanya peningkatan dari segi pembangunan Infrastruktur, Pemerintahannya lebih transparan atau terbuka, kepercayaan terhadap Pemerintah sudah lebih baik dan dari segi pendidikan dana dalam bentuk beasiswa, tour sudah merata.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat Kota Palembang dari 10 profesi yang terdiri dari 20 informan dapat di pahami bahwa masyarakat kota Palembang berdasarkan Profesi tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan kondisi Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak stabil dan belum berkembang dalam bidang ekonomi.

B. Dampak dari Opini Masyarakat Kota Palembang terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan Kepuasan dari suatu hasil kinerja dalam Pemerintahan pastinya akan ada dampak yang dirasakan dari kepuasannya ataupun yang tidak merasakan puas dan berkemungkinan ada pengaruh di bidang pekerjaan menurut profesi itu sendiri. Inilah hasil wawancara untuk menjawab persoalan rumusan masalah nomor 2 (dua).

1. Profesi TNI

Pada tahap ini peneliti telah menanyakan tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut profesi TNI yang berinisial AS usia 53 tahun, beliau mengatakan tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Dampak dari ketidakpuasan itu dalam bidang ekonomi banyak, sudah itu dalam bidang kehidupan militer, militer itu harusnya gini jadinya gini sudah itu dampaknya lagi ketegassan atasan saya kepada bawahan itu tidak ada yang tegas lagi jadi semuanya memerlukan keamanan diri sendiri keamanan jabatan diri sendiri demi pribadi masing-masing yang bisa ngubahnya itu ya menurut pandangan saya ya TNI untuk negara ini, kalau TNInya mantep dalam kotak ya gimana, negara maju itu tentaranya kuat tapi kalau tentaranya lembek takut lemah negara hancur dimanapun.⁹⁹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ketegasaan Presiden Joko Widodo harus lebih tegas dari sebelumnya sehingga bahkan berdampak pada TNI yang harus memiliki atasan yang tegas. Sementara itu apakah ada pengaruh di bidang pekerjaan sebagai TNI yang berinisial AS, beliau mengatakan:

Oh jelas pengaruhnya itu dalam bidang kedinasan sebagai saya seorang TNI tugas pokok saya seharusnya di bidang a itu jadi bidang b, bidang b bisa jadi bidang c jadi tugas TNI sekarang itu kurang jelas seharusnya pengamanan ataupun benteng negara itu di TNI tapi yang mengendalikannya kepolisian jadi TNI sekarang bisa mengambil ahli tugas Pak RT pun bisa di ambil ahli oleh TNI jadi apakah tugas TNI itu maksud saya itu TNI tu bisa untuk mengamankan ya mestinya untuk keamanan dengan benteng negara TNI itu punya sifat 3 (tiga) ucapan sapta marga, sebuah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI jadi sekarang ini semuanya ngak jelas contohnya sekarang dimana-mana ada demo hancur negara kita ini tapi ya itulah tergantung

⁹⁹ Kelanjutan, Inisial AS, Profesi TNI, di Kodam Markas Kodam II Sriwijaya Jalan Jendral Sudirman, wawancara tanggal 24 September 2019.

dengan pimpinan, jadi TNI sekarang ibaratnya dimasukkan ke kotak tapi kotak itu di bukap pintunya tapi ada batasnya itu TNI jadi ngak bisa banyak gerak.¹⁰⁰

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa banyak fungsi TNI tidak berjalan dengan maksimal atau tidak berjalan dengan fungsinya karena kurang maksimalnya memfungsikan TNI sebagaimana fungsinya. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai TNI yang berusia 43 tahun. Peneliti menanyakan dampak dari opini masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau mengatakan tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut: *“Dampak yang saya rasakan itu ya dari segi ekonomi ya dari sekitar tahun 94an ya kalau ga salah, miah tetep begini-begini aja.”*¹⁰¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang dirasakannya itu dari segi ekonomi. Sementara itu apakah ada pengaruh di bidang pekerjaan sebagai TNI sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“ya tentu ada pengaruhnya karena sejak masa Pemerintahan Pak Jokowi ini kebanyakan tugas TNI ini di ambil ahli oleh kepolisian.”*¹⁰² Dari pendapat berikut dapat dipahami bahwa ada pengaruhnya di pekerjaan Profesi sebagai TNI karena tugas TNI banyak yang diambil ahli oleh kepolisian.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ Kelanjuttan, Inisial MT, Profesi TNI, di Markas Kodam II Sriwijaya Jalan Jendral Sudirman, wawancara tanggal 24 September 2019.

¹⁰² *Ibid.*,

2. Profesi Polisi

Pada tahap ini peneliti menanyakan tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Polisi yang berinisial DA usia 21 tahun, beliau mengatakan puas dan dampak dari kepuasan tersebut:

Kalau dampak yang saya rasakan sekarang tu akses mau kemana-kemana sudah mudah kita bisa menikmati jalan tol seperti tol indralaya dan jalur kereta api yang mempercepat jarak tempuh tujuan perjalanan terus kan di Palembang juga sudah tersedia LRT jadi kalau kita naik LRT tu kan lebih cepat kita ngak terkena macet jadi itu sih dampak baik yang saya rasakan sehingga saya merasa puas.¹⁰³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa akses di Pemerintahan Jokowi lebih mudah akses untuk kemana-mana karena banyaknya fasilitas umum yang memadai dan baik. Sementara itu apakah ada pengaruh di bidang pekerjaan sebagai Polisi: *“Kalau sesuai dengan pekerjaan saya pada saat Pemerintahan Bapak Jokowi profesi saya sebagai polisi tentu sangat berpengaruh lebih baik, karna kalau pekerjaan seperti saya sekarang sudah sangat diperhatikan.”*¹⁰⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa Pemerintahan Jokowi lebih memperhatikan pekerjaan Polisi lebih baik. Informan yang selanjutnya berprofesi sama sebagai Polisi yang berinisial E berusia 53 tahun. Peneliti menanyakan dampak yang

¹⁰³ Kelanjutan, Inisial DA, Profesi Polisi, di Polda Kecamatan Kemuning Sumatera Selatan, wawancara tanggal 17 September 2019.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau mengatakan puas dan dampak dari kepuasan tersebut:

Dampaknya itu ya polisi sudah mendapat tempat di hati masyarakat dengan tugasnya selaku membina keamanan dan ketertiban penegak hukum maupun dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat jadi masih sebagian lagi yang belum mau menerapkan pekerjaan dengan keiklasan dengan aturan yang sudah di buat. Sedikit demi sedikit ada perubahan dengan rekrutmen ialah rekrutmen Polri maupun PNS itu adalah kebijakan dari Presiden jadi Polri ini betul-betul integritas.¹⁰⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa di masa Pemerintahan Jokowi kepercayaan masyarakat terhadap Polisi lebih baik dan rekrutmen sebagai Pegawai Negeri Sipil secara transparansi serta terbuka. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Polisi: *“Ada pengaruhnya untuk masuk jadi Polisi sudah agak lumayan transparasinya kemudian penempatan-penempatan ya unsur-unsur yang dibawah masih mempunyai pola lama ya siapa yang dekat siapa yang bisa melobby bukan melihat daripada karir.”*¹⁰⁶ Dari pendapat berikut dapat dipahami bahwa dalam rekrutmen masuk polisi sudah lebih baik dalam transparasinya.

¹⁰⁵ Kelanjutan, Inisial E, Profesi Polisi, di Spn Betung, wawancara tanggal 20 September 2019.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

3. Profesi Dosen

Pada tahap ini peneliti menanyakan tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Dosen yang berinisial YZ usia 30 tahun. Beliau mengatakan puas dan dampak dari kepuasan tersebut:

Dampaknya itu rasa kepercayaan kita terhadap Pemerintah itu sudah lebih baik jadi kita itu tidak ada kata ataupun keluhan lagi bawasannya segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan sogokan kira-kira itu kalau ditanyakan dampak lain ya kita punya prasangka yang baik dengan Pemerintah jadi mau ngurus apa-apa mesti berbaik sangka sama Pemerintahan.¹⁰⁷

Dari pendapat di atas dapat diapahmi bahwa pada masa Pemerintahan Jokowi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah lebih baik karena masyarakat sudah melihat bukti konkrit Pemerintahan seperti infrastruktur lebih maju. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Dosen sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Pengaruhnya ada sih sebenarnya 2014 saya belum kerja 2016 saya mulai kerja ada sebenarnya mungkin rekrutmen dosen waktu itu lumayan bagus walaupun ada beberapa masalah, kalau yang saya rasakan rekrutmen pegawai sipilnya itu ya kita sangat puas dengan mekanisme ataupun prosedur yang diterapkan Pemerintahan Jokowi dalam merekrut Pegawai negeri sipil bukan hanya dosen tapi keseluruhan ya karna saya merasakan saya ngak pakai apa-apa daftar PNS tapi bisa lolos gitu jadi ini tidak bisa dapatkan atau agak sulit kita dapatkan di era-era sebelumnya. Misalnya di era SBY itu rekrutmen Pegawai Negeri Sipil itu banyak orang-orang yang tidak kompeten ya itu memang banyak yang lolos banyak yang tiba-tiba ngak pernah ikut test tapi tiba-tiba namanya ada nah itu agak susah ditemukan di era Jokowi. Ya maksudnya kalau di

¹⁰⁷Kelanjutan, Inisial YZ, Profesi Dosen, di UIN Raden Fatah Palembang, wawancara tanggal 19 September 2019.

kementrian agama di kementrian risedikti itu seluruhnya murni ya ataupun di daerah-daerah itu kalau presentasinya itu mungkin 80% semuanya murni mungkin ada di beberapa kementrian kalau yang saya denger-denger di kementrian kumenkumham itu masih ada praktek-praktek sogok meyogok segala macam tapi secara pribadi kalau misalnya kayak scop kecil di UIN ini bisa saya pastikan sekitar 95% itu memang murni lolos tidak ada yang misalnya nyogok menyogok dan segala macam jadi itu sih kalau yang sangat berdampak. Tapi ini agak berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil yang sudah lama menjadi Pegawai Negeri Sipil misalnya guru ataupun di dinas-dinas lain mereka agak ngerasa terdampak dengan kebijakan-kebijakan Jokowi misalnya banyaknya tunjangan yang dikurangi atau segala macam tapi saya belum merasakan itu yang paling punya dampak ya itu tadi rekrutmen sumber daya manusia dalam hal ini rekrutmen birokrat di Indonesia itu sudah lumayan membaik sebaiknya sistemnya walaupun masih ada cela sedikit-sedikit tapi sudah jauh lebih baik dari pada Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.¹⁰⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam rekrutmen PNS di dalam masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah transparan tidak bisa memanipulasi hasil rekrutmen PNS apabila sesuai dengan kompotensinya maka akan masuk PNS apabila tidak sesuai kompotensinya maka tidak masuk PNS. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai Dosen yang berinisial WS usia 45 tahun mengatakan bahwa ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Kalau dampaknya ya sebagai dosen PNS ya naik gajinya artinya ya walaupun tidak besar ya lumayan untuk tambahan tapi sebenarnya dengan adanya gaji naik 5 % itu ya sama saja tidak ada pengaruh apa-apa karena dengan harga bahan pokok yang semakin mahal karena Pemerintah itu memberi penyesuaian dengan harga bahan pokok semakin mahal

¹⁰⁸ *Ibid.*,

makanya gaji dinaikkan 5 % tapi sebenarnya sama saja tidak ada pengaruhnya apa-apa setelah di naikkan.¹⁰⁹

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa walaupun gaji PNS naik 5 % tapi tidak ada pengaruhnya karena Pemerintah menaikkan gaji karena untuk penyesuaian harga bahan pokok yang semakin mahal. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang bpekerjaan sebagai Dosen setelah Pemerintahan Presiden Jokowi: *“Kalau pengaruh secara langsung sebagai Dosen tidak ada”*.¹¹⁰ Dari pendapat tersebut mengatakan bahwa di bidang pekerjaan sebagai Dosen tidak ada pengaruhnya setelah Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

4. Profesi Guru

Peneliti menanyakan dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Guru yang berinisial SW usia 42 tahun. Beliau mengatakan puas dan dampak dari kepuasan tersebut: *“Dampaknya itu tadi karena kalau tentang Pendidikan sebagai guru ya merasa puaslah tadinya sertifikasi untuk meningkatkan profesi guru agar jadi guru professional itulah adanya gaji sertifikasi Alhamdulillah bagus positif.”*¹¹¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Pengaruh di bidang pekerjaan guru memperhatikan kehidupan guru terbukti dengan adanya

¹⁰⁹ Kelanjuttan, Inisial WS, Profesi Dosen, di UIN Raden Fatah Palembang, wawancara tanggal 1 Oktober 2019.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Kelanjuttan, Inisial SW, Profesi Guru, di SD Negeri 149 Palembang, wawancara tanggal 23 September 2019.

gaji profesional lebih memperhatikan kehidupan sebagai guru. Sementara itu apakah ada pengaruh di pekerjaan sebagai Guru sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Kalau sebagai Guru pengaruhnya yang lumayan bagus guru disamping ada gaji pokok ada gaji tunjangan sertifikasi di situ ada gaji sertifikasi kami sebagai guru untuk meningkatkan prestasi motivasi untuk anak biar anak bagus.”*¹¹²

Dari pendapat di atas dipahami bahwa Pemerintahan Jokowi memperhatikan kehidupan guru dengan adanya gaji profesional sehingga membuat guru lebih meningkatkan lagi prestasi atau motivasi dalam mengajar. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai Guru yang berinisial A usia 25 tahun bahwa ia merasa puas dan dampak dari kepuasan sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Dampaknya contohnya ya BPJS itu sangat diperhatikan sekali sama Jokowi sekarang mala katanya yang bagian berobat menggunakan BPJS itu misalnya kritis ngak perlu kerumah sakit yang ada BPJSnya yang kerja sama BPJS, jadi ruma sakit dimanapun boleh menerima masyarakat yang kritis maksudnya tu harus di tindak terlebih dulu, baru rumah sakit itu mintak rembes sama rumah sakit yang menunjukkannya. Jadi kalau saya sih menilainya bermanfaatlah untuk masyarakat untuk yang kurang mampu.¹¹³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa BPJS itu sangat diperhatikan terbukti dengan mempermudah urusan apabila masyarakat sakit bisa berobat ke rumah sakit dengan mudah tanpa

¹¹² *Ibid.*,

¹¹³ Kelanjutan, Inisial A, Profesi Guru, di SMA Negeri 14 Palembang, wawancara tanggal 24 September 2019.

mengeluarkan biaya. Sementara itu apakah ada pengaruh di pekerjaan sebagai Guru sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kalau di bidang Guru honorer ya terutama saya liat kalau misalnya guru honorer tu sekarang ada pengangkatan maupun guru honorer menjadi PNS dan ada yang namanya P3K itu yang mana ikut tes P3K berarti guru honorer itu bukan menjadi PNS sih, P3K itu lebih tepatnya guru honorer itu tes ya tetapi ya ada ikatan dinasnya tetapi tidak ada uang pensiunnya, contohnya misalnya dia lulus P3K itu jadi guru tapi gajinya ada gaji pokoknya tapi kalau pension dia tidak dapat gaji pension beda dengan PNS. Tapi kalau dulu kan malah guru honorer tidak di pandang sama sekali sebelum kepemimpinan Jokowi kan kalau sekarang kan ada yang namanya test P3K dan test CPNS guru honorer di angkat menjadi PNS dan guru honorer bisa juga ikut test P3K.¹¹⁴

Dari pendapat di atas dapat di pahami bahwa masa Pemerintahan Jokowi sangat memperhatikan guru honorer terbukti dengan adanya test P3K dengan adanya gaji pokok.

5. Profesi Pengusaha

Peneliti menanyakan dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Pengusaha yang berinisial MHS usia 28 tahun. Beliau mengatakan puas dan dampak dari kepuasan tersebut:

Dampak saya merasa puas salah satunya ini ketika kita mengirim barang seperti sayur ketika jalan satu-satunya tidak bisa dilalui akhirnya kita mengalamikerugian, ketika jalan macet sekarang ada pilihan ke jalan Tol Indralaya, berarti ada jalan lain yang disiapkan Pemerintah untuk menatarkan barang kita, jadi gini kalau macet kita kan di jalan bisa beberapa jam sedangkan yang membawa sayur kan ga bisa lama-lama, saat beberapa jam itu sayur itu tidak datang tepat waktu kan sayurnya jadi busuk akhirnya yang rugi ya pengusaha sayur itu,

¹¹⁴ *Ibid.*,

itukan pengusaha kecil. Jadi intinya Pemerintahan Presiden Jokowi lebih baik dari sebelumnya.¹¹⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa mempermudah pekerjaan seperti pengusaha sayur karena banyak akses-akses jalan menuju tepat sayur akan di jual sehingga kecil kemungkinan sayur akan mengalami busuk dan merugikan. Sementara itu apakah ada pengaruh di pekerjaan sebagai Pengusaha sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Sebagai pengusaha kita jauh lebih enak kalau zaman dulu kita mau masukkin proyek biasanya orang-orang sudah ada channel di dalam, kalau sekarang kita bisa bersaing seperti memalalui lelang proyek online sekarang lebih transparan dari yang sebelumnya, jadi kami sebagai pengusaha ini baik izin dan yang lainnya dipermudah asal persyaratannya lengkap. Kalau kemarin masih terbilang sangat sulit akibatnya untuk bikin izin menjadi lebih ribet. Jadi untuk pengusaha lebih enak dibandingkan era sebelumnya.¹¹⁶

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Presiden Jokowi mempermudah usaha dalam persoalan perizinan sehingga pengusaha lebih cepat berkembang di usahanya. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai Pengusaha yang berinisial CS usia 51 tahun, mengatakan bahwa ia merasa puas dan dampak dari kepuasam tersebut: *“Dampak nya itu ya harga bahan ya memang pada saat*

¹¹⁵ Kelanjutan, Inisial MHS, Profesi Pengusaha, di sekip, wawancara tanggal 12 September.

¹¹⁶ *Ibid.*,

tertentu dia melonjak ya mungkin pemasukan agak kurang mungkin terganggu.”¹¹⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang dirasakan dari perekonomian dikarenakan pemasukan terganggu. Sementara itu apakah ada pengaruh di bidang pekerjaan sebagai Pengusaha, beliau mengatakan:

Kalau untuk Pengusaha yang jelas pengaruhnya ada contohnya ya bagi yang selama ini tidak bisa mencari karena kesulitan transportasi, kesulitan ekonomi dan lain-lain itu bisa kita atasi dengan pinjaman modal bisa dilakukan dengan jalan transportasi yang lancar jadi kalau jalan bagus hasil panen dari pedesaan ya akan dipasarkan daerah perkotaan, jadi pengusaha-pengusaha itu bisa bisnisnya bisa lancar karena transportasinya bagus.¹¹⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada pengaruh di bi bidang pekerjaan sebagai pengusaha karena akses untuk menyebarkan atau penjualan barang atau produk yang dihasilkan oleh pengusaha mempermudah untuk akses perjalanan.

6. Profesi Satpam

Peneliti akan menanyakan dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo,, menurut Satpam yang berinisial EP usia 42 tahun. Beliau mengatakan tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut “*Dampak saya merasa tidak puas ya dari masalah ekonomi tadi khususnya untuk rakyat-rakyat kecil*

¹¹⁷Kelanjutan, Inisial CS, Profesi Pengusaha, di daerah sekup, wawancara tanggal 12 September 2019

¹¹⁸ *Ibid.*,

seperti saya sayang keberatan dengan masalah ekonomi sekarang dengan harga-harga yang melonjak tinggi."¹¹⁹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak merasa tidak puas yang ia rasakan terutama masalah ekonomi khususnya untuk rakyat-rakyat kecil sangat keberatan dengan masalah ekonomi sekarang dengan harga yang melonjak tinggi. Sementara itu apakah ada pengaruh di pekerjaan sebagai satpam: *"Selama masa dalam Pemerintahan Jokowi tidak ada pengaruhnya di bidang profesi saya sebagai satpam yang ada pengaruhnya tadi ya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga.*"¹²⁰

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa selama masa Pemerintahan Jokowi tidak ada pengaruhnya di bidang profesi satpam yang ada pengaruhnya ibu-ibu rumah tangga. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai satpam yang berinisial RP yang berusia 29 tahun mengatakan ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Dampak yang membuat saya merasa tidak puas ada banyak hal terutama masalah ekonomi harga BBM melonjak naik dan jalan-jalan yang sudah rusak parah tapi belum diperbaiki, sedangkan jalan-jalan di kota semakin bagus tapi kenapa jalan-jalan di plosok desa itu masih seperti sawah. Disini memperlihatkan bahwa Bapak Jokowi lebih mementingkan rakyat-rakyat yang di atas dibandingkan dengan rakyat kecil.¹²¹

¹¹⁹ Kelanjutan, Inisial EP, Profesi Satpam di Unsri Bukit, wawancara tanggal 16 September 2019.

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ Kelanjutan, Inisial RP, Profesi Satpam, di UIN Raden Fatah Palembang, wawancara tanggal 16 September 2019.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang merasa tidak puas masalah ekonomi harga BBM melonjak naik dan jalan yang sudah rusak tapi belum di perbaiki, tapi jalan yang berada di kota semakin bagus sedangkan jalan di desa seperti sawah. Bahwa Jokowi lebih mementingkan rakyat-rakyat kalangan atas dibanding rakyat kecil. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai satpam:

Tidak terlalu berpengaruh di pekerjaan saya, karena saya bekerja di perorangan bukan di Pemerintahan kadang kerja sebagai satpam gajinya susai umur kadang juga kesepakatan sama bos, kalau saya ini kerja sama bos di gaji berdasarkan kesepakatan saya dan bos.¹²²

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa tidak ada pengaruh dipekerjaan satpam karena satpam gajinya sesuai dengan kesepakatan sama atasan.

7. Profesi Pegawai Swasta

Peneliti akan menanyakan hal yang sama mengenai tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut profesi Pegawai Swasta yang berinisial PD usia 23 tahun. Beliau mengatakan bahwa ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Kalau dampak yang dirasakan ya contohnya kalau pegawai kan adanya BPJS ketenaga kerjaan, itu kan harusnya lebih di optimalkan lagi untuk kaum di bawah jangsan dikit-dikit

¹²² *Ibid.*,

menaikkan anggaran tapi fasilitas yang diberikan itu kurang tidak sesuai dengan apa yang kita bayar.¹²³

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada masa Pemerintahan Jokowi biaya pengeluaran untuk anggaran BPJS tidak sebanding dengan fasilitas yang kita dapatkan. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai pegawai swasta pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“kalau menurut saya di pekerjaan saya ya tidak ada pengaruh apa-apa.”*¹²⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa sebagai profesi Pegawai Swasta tidak ada pengaruh di bidang pekerjaannya. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai Pegawai Swasta yang berinisial IR usia 22 tahun mengatakan bahwa ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut: *“Dampak yang membuat saya merasa tidak puas itu ya itu tadi banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang membuat masyarakat merasa kecewa.”*¹²⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang membuat masyarakat kecewa. Sementara itu apakah ada pengaruh di bidang pekerjaan sebagai Pegawai Swasta sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo: *“Kalau menurut saya tidak ada pengaruh di pekerjaan saya kecuali UMR kalau*

¹²³ Kelanjutan, Inisial PD, Profesi Pegawai Swasta, di PT Raja Wali Suka Bangun, wawancara tanggal 17 September 2019.

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ Kelanjutan, Inisial IR, Profesi Pegawai Swasta, di PT Raja Walu Suka Bangun, wawancara tanggal 17 September 2019.

*Pemerintahan Jokowi menetapkan UMR tinggi maka pengaruhnya ya gaji saya akan tinggi juga mungkin itu.*¹²⁶ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Pegawai Swasta.

8. Profesi Pedagang

Tahap ini akan membahas tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut profesi Pedagang yang berinisial SM usia 38 tahun. Beliau mengatakan tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Dampak yang membuat saya tidak merasa puas ya pokoknya saya merasa sekarang ini serba kekurangan hidup serba berkecukupan saya sudah tidak bisa lagi menyisihkan pendapatan saya sebagai tabungan malah saya harus membongkar tabungan untuk menutupi berbagaintagihan, hal ini dikarenakan oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya keluarga.¹²⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang dirasakan pada masa Pemerintah Jokowi banyak biaya-biaya dalam bertahan hidup di Indonesia sangat tinggi tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat harus memutar otak untuk bertahan hidup. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai pedagang setelah masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Kelanjutan, Inisial SM, Profesi Pedagang, di Pasar Perumnas Sako, wawancara tanggal 18 September 2019.

Kalau masalah pedagang ya sangat berpengaruh misalnya ya harga naik jadi konsumen sudah agak mulai bekurang dikarenakan harga-harga bahan pokok melonjak jadi saya berharap sekali agar Bapak Jokowi jangan dengan mudahnya menaikkan harga bahan pokok.¹²⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa di bidang pekerjaan sebagai pedagang sangat berpengaruh karena konsumen berkurang penyebabnya harga bahan pokok melonjak tinggi. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai Pedagang yang berinisial RS usia 22 tahun mengatakan bahwa ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Dampak yang membuat saya merasa tidak puas itu ya karena itu tadi mbak saya sebagai Pedagang banyaklah mengimpor bukannya mengekspor karena menurut saya kita yang mempunyai sumber daya alam yang banyak kita mempunyai pertanian serta industri dan perikanan yang banyak mengapa tidak dimanfaatkan kenapa tidak kita mengekspor tapi malah sekarang mengimpor jadi kami yang menjadi selaku pedagang dalam hal perekonomian merasakan kecewa karena menurut saya bagaimana kami bisa sejahterah kalau kita sudah mempunyai sumber daya alam kenapa tidak dipemberdayakan dengan baik.¹²⁹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Indonesia selalu mengimpor dan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak tapi tidak dimanfaatkan, jadi profesi sebagai Pedagang merasakan kecewa karena merasa belum sejahterah. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Pedagang sejak Pemerintahan Joko Widodo:

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Kelanjutan, Inisial RS, Profesi Pedagang, di Pasar Sekip, wawancara tanggal 1 Oktober 2019.

Menurut saya yang berpengaruh karena saya Pedagang saya berjualan jadi menurut saya seharusnya ya lebih pedulilah sama pedagang untuk petani dan lain-lain karena dalam situasi perekonomian Indonesia ini sedang turun apalagi banyak barang-barang yang di import jadi saya itu merasakan yah masih susahlah namanya aja pedagang.¹³⁰

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Pedagang karena perekonomian di Indonesia sedang turun jadi sebagai Pedagang merasakan kesusahan.

9. Profesi Buruh

Tahap ini akan membahas tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Buruh yang berinisial BS usia 44 tahun. Beliau mengatakan puas dan dampak dari kepuasan tersebut:

Dampaknya ya dari segi kesejahteraan enak dari pada sebelum-belumnya soalnya liat barang-barang itu stabil sudah itu mau jalan-jalan kemana-mana itu waktunya lebih cepat karena ada jalan tol, ngak kayak dulu, dulu dari Palembang ke Jawa Timur aja makan tiga hari tiga malam kalau sekarang kan cuma satu malam sudah sampai.¹³¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang membuat merasa puas sudah merasakan kesejahteraan dan infrastruktur lebih maju sehingga bisa mempercepat perjalanan. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai buruh: *“Kalau pengaruh sih ya ngak ada, namanya jadi buruh yah*

¹³⁰*Ibid.*,

¹³¹ Kelanjutan, Inisial BS, Profesi Buruh, di Kecamatan Sako, wawancara tanggal 20 September 2019.

kalau banyak bangunan malah jadi enak, kalau buruh itu siapapun jadi Presidennya ya ngak ngaruh apa-apa tetap jadi beginilah.”¹³²

Dari tanggapan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada pengaruhnya karena mau siapapun yang jadi Presiden pekerjaan buruh tetap tidak akan ada perubahan. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai Buruh yang berinisial MA usia 34 tahun mengatakan bahwa ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut: *“Dampak yang saya rasakan ini karena saya sulit untuk bertahan hidup karena apa-apa mahal listrik mahal air mahal beras mahal ya itu tadi Presiden Joko Widodo kurangnya memperhatikan masyarakat kecil seperti saya.”¹³³*

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang dirasakan kebutuhan pokok sudah naik dari air, listrik dan beras. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Buruh:

Ya kalau sebagai buruh ni susah yah gaji aja di gaji harian oleh atasan saya itu juga hasilnya kadang ngak cukup buat kehidupan sehari-hari karena bahan pokok sudah semakin mahal, jadi saya mohonlah untuk Presiden jangan seenaknya menaikkan harga bahan pokok kasian dengan rakyat kecil.¹³⁴

¹³² *Ibid.*,

¹³³ Kelanjutan, Inisial MA, Profesi Buruh, di Kecamatan Kalidoni, Wawancara tanggal 20 September 2019.

¹³⁴ *Ibid.*,

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa di era Presiden Jokowi bahan pokok semakin naik, tidak sesuai dengan pendapatan buruh.

10. Profesi Petani

Tahap ini akan membahas tentang dampak yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Petani yang berinisial SR usia 41 tahun. Beliau mengatakan tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Dampak yang saya rasakan itu ya susah lihat itu di kampung harga karet aja sudah murah harga barang pokok yang lain mahal, seperti saya sebagai Petani saya merasa ambruk karena harga pupuk racun apa itu semuanya mahal jadi ya ngak bisa dibilang enaklah kalau bagi Petani.¹³⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang saya rasakan sejak Pemerintahan Presiden Jokowi harga karet semakin terpuruk sehingga Petani merasakan sengsara di Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai Petani sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Kalau sebagai Petani tentu sangat berpengaruh, misalnya seperti gula 1 kilonya Rp 9.000 sekarang jadi Rp 15.000 sedangkan karet tadinya di Palembang masih berharga Rp 8.000 berarti 2 kilo karet baru dapat 1 kilo gula, nah disitulah yang faktor ekonomi kita mundur bukannya maju, jadi intinya itu berhasilnya petani bisa berhasil juga yang lainnya kalau petani sudah anjlok yang menengah kebawah pasti pasti juga anjlok ya mungkin yang di atas mungkin dia ga liat, jadi rakyat miskin gimana harusnya itu ya Pemerintah harus diatasi harus

¹³⁵ Kelanjutan, Inisial SR, Profesi Petani di Kecamatan Kalidoni, wawancara tanggal 26 September 2019.

liat harus benar-benar turun ke kampung-kampung harus benar-benar liat kedalam.¹³⁶

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa faktor ekonomi di Indonesia menurun jadi kalau petani berhasil maka berhasil juga yang lainnya. Informan selanjutnya yang berprofesi sama sebagai satpam yang berinisial SY usia 57 tahun mengatakan bahwa ia merasa tidak puas dan dampak dari ketidakpuasan tersebut:

Dampaknya itu kalau bagai petani sayur lebih parah dari petani-petani yang lain, sayur itu misalnya kayak nanam sayur pupuknya mahal racunnya mahakl nah sedangkan ongkos mobil kendaraannya mahal misalnya kayak dari curup di antar ke Palembang ongkosnya sudah berapa coba, kadang kendala jalannya jelek ya satu mobil tebuang aja karena sayurnya busuk.¹³⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dampak yang dirasakan sebagai petani sayur bahan untuk pemerawatannya sudah mahal bahkan untuk transportasi untuk pngkos juga mahal jadi untuk Petani sayur sangat dirugikan. Sementara itu apakah ada pengaruhnya di bidang pekerjaannya setelah masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

Tentu ada pengaruhnya karena sejak Pemerintahan Jokowi ibaratnya pengeluaran untuk bikin sawah bikin kebun itu mahal apalagi harga-harga sudah pada mahal misalnya harga pupuk harga racun sedangkan harga gabahnya murah bahkan ada yang nggak beli, jadi bener-bener petani itu menjerit orang-orang juga kena dampaknya berhubung petani ga berhadil ya semuanya kebutuhan makan sehari-hari pasti mahal.¹³⁸

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ Kelanjuttan, Inisial SY, Profesi Petani Sayur, di Kecamatan Kalidoni, wawancara tanggal 27 September 2019.

¹³⁸ *Ibid.*,

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa sejak Pemerintahan Jokowi ada pengaruhnya di bidang pekerjaan sebagai petani karena di era Pemerintahan Jokowi apabila ingin membuat kebun itu biayanya sudah semakin mahal tetapi harga gabahnya murah itu yang membuat petani semakin terpuruk.

Dari uraian di atas dampak ketidakpuasan dari hasil wawancara dari 12 informan menyatakan bahwa yang di rasakan masyarakat kota Palembang adanya permasalahan di Indonesia dari segi perekonomian dan harga bahan pokok, minyak di Indonesia melonjak tinggi membuat masyarakat terbebani dan merasa tidak sejahtera, hal ini membuat aktivitas masyarakat kota Palembang terbatas karena semua barang pokok melonjak naik membuat perekonomian berkurang.

Sedangkan ada 8 informan yang merasakan dampak kepuasan dikarenakan adanya peningkatan dari segi pembangunan Infrastruktur seperti LRT dan jalan tol, hal inilah yang mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, dan dari segi pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik merata untuk masyarakat.

Sebagai tinjauan dalam penelitian bahwa masyarakat melihat tingkat kepuasan sama dengan teori kepuasan yang dijelaskan oleh Christopher C. Heathwood bahwa seseorang akan merasakan hidupnya puas jika hidupnya sudah sejahtera maka sebaliknya jika seseorang merasa

hidupnya tidak puas maka hidupnya tidak sejahtera. Tingkat kepuasan seseorang bisa di ukur dengan kesejahteraan. Setelah di uji bahwa teori kepuasan dari Christopher C. Heathwood berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena jika masyarakat tidak puas maka masyarakat tidak sejahtera maka sebaliknya jika masyarakat puas maka hidupnya sejahtera. Jadi dari hasil penelitian ternyata masyarakat Kota Palembang masih banyak yang belum sejahterah karena mereka masih banyak yang merasa tidak puas dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepuasan atau ketidakpuasan yang di alami masyarakat itu setara dengan kesejahteraan, dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa masyarakat kota Palembang dalam segi profesi merasa tidak puas dengan pemerintahan Joko Widodo hal ini dapat di tarik bahwa masyarakat kota Palembang belum merasakan kesejahteraan pada masa pemerintahan Joko Widodo pada Periode 2014-2019 ini, karena masih banyak yang harus di optimalkan dan merata baik secara (sumber daya alam) SDA maupun (sumber daya manusia) SDM agar masyarakat bisa merasakan kehidupan yang sejahtera dan makmur.
2. Dampak ketidakpuasan masyarakat kota Palembang karena adanya permasalahan di indonesia dari segi perekonomian dan harga bahan pokok, minyak di Indonesia melonjak tinggi membuat masyarakat terbebani dan merasa tidak sejahtera, hal ini membuat aktivitas masyarakat kota Palembang terbatas karena semua barang pokok melonjak naik membuat perekonomian berkurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Presiden Joko Widodo diharapkan pada periode 2019-2024 bisa lebih mengoptimalkan lagi dari segi perekonomian, pendidikan, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan alam lebih di optimalkan lagi agar masyarakat diseluruh indonesia bisa merasakan kesejahteraan dalam kebutuhan sehari-hari..
2. Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya lebih memperhatikan masyarakat kecil dan bisa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat kecil.
3. Masyarakat perlu turut berpartisipasi di dalam hal kepemimpinan, dan secara aktif menyampaikan aspirasi kepada pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Dari pencapaian yang telah Presiden Joko Widodo lakukan di harapkan bisa dipertahankan dan di tingkatkan untuk Indonesia lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Daru Buku :

- Arsil, Fitra, (2017). *Teori Sitem Pemerintahan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Kota Palembang Dalam Angka*, Palembang : BPS Kota Palembang.
- Heathwood. C. Christopher, (2005). Desire-Satisfaction Theories Of Welfare. *Jurnal Pascasarjana Universitas Massachusetts Amherst*, hal 5-6.
- Ndraha, Taliziduhu, (2003). *(Kybernology) Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta : PT Rineka Ciota.
- Panorama, Maya, Muhajirin, (2018). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Idea Press.
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sulistyo, Eko, (2019). *Jokoway Jalan Kepemimpinan Jokowi*, Jakarta : Moka Media.

Dari Jurnal :

- Apriani, R., & Maharani, M. (2019). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 17-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4065>
- Chandra, A., Darmawan, E., & Yesi, Y. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial*

Dan *Politik*, 2(1), 12-30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i1.4061>

Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza Dan Beni Hernedi). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 28-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066>

Efriza, (2018). Refleksi dalam memaknasi eksistensi rakyat : antara pemelihan presiden dan pemilihan. *Jurnal MPR. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta*. Volume 3 Nomor 1.

Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(2), 149-161. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058>

Lapalelo, Aditya, Putra, (2016). Bingkai sosok Jokowi sebagai Presiden dalam pemberitaan setahun pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas edisi 19-21 Oktober 2015. *Skripsi universitas Surabaya*.

Mikail, Kiki. “PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019”. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed January 31, 2020. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.

Mikail, K. (2018). IJTIHAD POLITIK ISLAM PALEMBANG DI MASA ORDE BARU. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30-53.

Mubdi, Umar, (2016). Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi – JK. *Jurnal Universitas Gadjra Mada Yogyakarta*. Volume 1, Nomor 3.

Mukti, Citra, Tiara, (2017). *Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen*. Volume 2 Nomor 1, hal 18.

- Nia Karniawati (2015) *Hakikat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat)*. Vol. 1, No.2. h. 205.
- Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 55-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068>
- Sangaji, Fauzy, Rizki, (2018). Penerapan analisis sentimen untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo pada media sosial twitter menggunakan support vector machine. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Simangunsong, Satria, Simon, (2017). Perubahan Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Kepemimpinan Joko Widodo mengenai permasalahan hukum dan hak asasi manusia tahun 2014-2016. *Skripsi Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau*.
- Wulandari, D. Theresia, (2016). Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menurut kaca mata 5 media massa di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Volume 3 Nomor 1.
- Yahya, A. (2019). Political Communication of Hasan Basri Agus; Dramaturgical Analysis in Jambi Local Government Implementation. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 156-165. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401>

Sumber Internet Berita :

Ameidyo Daud, *Menakar Rapor Kinerja Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*,

<https://katadata.co.id/telaah/2018/10/26/catatan-rapor-biru-dan-merah-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>, Diakses tanggal 12 November 2019.

Biografi Joko Widodo, *Kisah Tukang Kayu Menjadi Presiden Indonesia*,

<https://www.biografi.co>, diakses tanggal 24 September 2019.

Ihsanuddin, *Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Prinsip Good*

Governance, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/23/09202591/Presiden.Jokowi.Dinilai.Abaikan.Prinsip.Good.Governance>, Diakses tanggal 12 November 2019.

TribunManado.co.id, *Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan*

Keamanan Indonesia (Menko Polhukam). <https://manado.tribunnews.com>, diakses tanggal 12 November 2019.

Nama Pewawancara : Sisi Anggun Pratiwi

Narasumber : Masyarakat Kota

Palembang Lokasi Penelitian : Kota Palembang

Pedoman Wawancara

1. Apakah anda merasa puas dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo ?
2. Bagaimana menurut anda selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ?
3. Menurut anda bagaimana kondisi Indonesia saat ini pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ?
4. Apakah anda merasakan ada pengaruh di bidang pekerjaan anda setelah masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ?
5. Dampak apa saja yang anda rasakan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1049/Un.09/VIII/PP.01/08/2019**

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **a.n: Sisi Anggun Pratiwi, 26 Agustus 2019**

- MENGINGAT :**
31. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 32. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 33. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 34. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 35. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 36. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropik, M.Si	197906192007101005	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.Si	2012129301	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Sisi Anggun Pratiwi
N I M : 1657020121
Prodi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Tingkat kepuasan Masyarakat Kota Palembang terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 28 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2020

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 28 Agustus 2019
Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : SISI ANGGUN PRATIWI
 NIM : 1657020121
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : FUSIP
 Judul Skripsi : TINGKAT KEDUASAHI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG
TERHADAP PEMERINTAHAN PRESIDEN TOKO WIDAD
PERIODE 2017-2019
 Pembimbing I : AMUR ROPK M.Si
 Pembimbing II : SITI ANISYAH M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	30/8-2019	perbaikan latar belakang masalah becum tergambar apa yang menjadi Pemicu penelitian. - Data & sumber data harus jelas	
2	9/9-2019	Ace BAB I lanjut ke pembimbing II untuk ke BAB II.	
3	17/9-2019	perbaikan BAB II. sesuai dengan catatan pada masing-masing halaman to di tandai	
4	29/9-2019	perbaikan Bab III - Sistematika penulisan - pengutipan - hasil wawancara yang di analisis	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
5.	9/10-2019	<p>Bab III. Pembahasan Analisis dan tiori waran cara</p> <p>Kemukakan semua di lapangan pendis pias/ pada piasnya anasjant terfaktor Cimerju 101. keli</p>	
6.	10/10-2019	<p>Ace bab III lanjut ke bab IV dan baeh di ajukan pada ujian komprehensif</p> <p>Untuk Bab IV konsultasikan kembali dengan pembimbing II</p>	
7.		<p>Perbaiki kesimpulan/Bab IV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesimpulan belum menjawab per masalah - Buat Kelengkapan skripsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lata pengantar 2. abrak talan 2/3 babak. 3. Daftar isi 4. Motto/pembukaan 5. pernyataan dari hal + lain. sebagai penunjang skripsi' terman 6. Daftar pustaka. sk. p. ulam ke. 	
8.	11/10-2019	<p>Ace bab keseluruhan dan dapat di ajukan pada ujian muna qobah</p>	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : SISI ANGGUN PRATIWI
 NIM : 1657020121
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : FSIP
 Judul Skripsi : TINGKAT KEDUASAM MASYARAKAT KOTA
PALEMBANG TERHADAP PEMERINTAHAN
PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE 2014-2019
 Pembimbing I : AINUR ROPIK, M.Si
 Pembimbing II : SITI ANISYAH, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	29/8-2019	→ Latar belakang masalah belum menggambarkan apa yang ingin diteliti - di judul, tambahkan periode - Data & Sumber data kurang jelas	
2	5/9-2019	→ Acc BAB I	
3	13/9-2019	→ di Bab II Harus menjelaskan gambaran umum penelitian - di setiap tabel harus di analisis dalam bentuk Paragraf.	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
4	16/9-2019	→ Pertanyaan wawancara belum lengkap	
5	19/9-2019	→ Setiap tabel di analisis	
6	23/9-2019	→ ACC BAB II	
7	29/9-2019	→ Lengkapi tulisanya yang masih banyak salah dan lakukan wawancara dengan masyarakat dari berbagai jenis profesi	
8	2/10-2019	→ Analisis setiap hasil wawancara	
9	3/10-2019	→ Sistematika penulisan diperbaiki	
10	4/10-2019	→ Acc BAB III, di bab 4 harus dibuat kesimpulan dan saran.	
11	7/10-2019	→ Diperbaiki lagi kesimpulannya	
12	8/10-2019	→ Acc BAB IV	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.983 /Un.09/VIII/TL.01/08/2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Penelitian

21 Agustus 2019

Kepada Yth.
Masyarakat Umum Kota Palembang
di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :


Nama : Sisi Angun Pratiwi
NIM : 1657020121
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan.


Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan :
1. Ka.Prodi Ilmu politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.9.5 Palembang 30128 Telp: (071) 951898 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

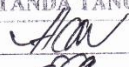





Pada hari Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2019 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sisi Anggun Pratiwi
 Nomor Induk Mahasiswa : 1657020121
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik / FISIP
 Judul Skripsi : Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palembang Terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019

MEMUTUSKAN

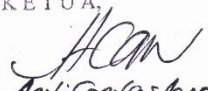
1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini Kamis maka saudara dinyatakan : LULUS/ ~~.....~~
 Indeks Prestasi Kumulatif :, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) *Sarjana Sosial (S.Sos)*.
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berikutnya.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

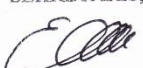
NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Andi Consta Jaya, M.Kum</u>	Ketua penguji	
2	<u>Erik Darmawan, M.Hi</u>	Sekretaris Penguji	
3	<u>Prof. Dr. Romliani, M.A</u>	Penguji Utama	
4	<u>Babarudin Asorkeisyi, M.M.</u>	Penguji Kedua	
5	<u>Ainur Rafik, M.Si</u>	Pembimbing I	
6	<u>Siti Anisya, M.Si</u>	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 07-11-2019

KETUA,


Dr. Andi Consta Jaya
 NIP. 197201192007011011

SEKRETARIS,


Erik Darmawan, M.Si
 NIPN. 0217057402

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30128 Telp: (0711)354689 Website : www.radenfatah.uin.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :


Nama : Sisi Anggun Pratiwi
NIM : 1657020121
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palembang Terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.

Telah dimunaqasahkan pada hari Kamis tanggal 07 bulan 11 tahun 2019

dinyatakan **LULUS** / Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

Palembang, 07-11-2019

Ketua,


Dr. Anis Conda Sarp. M. Hum
NIP. 197201192007011011

Tembusan :



1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI

Nama : Sisi Anggun Pratiwi
 NIM : 1657020121
 Program Studi : Ilmu Politik
 Tanggal Ujian Munaqasah : 7 November 2019
 Judul Skripsi :

OPini Masyarakat Kota Palembang Pias dan Tidak Pias
dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019.


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQASAH DAN TELAH
 DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Izomiddin, MA	Penguji I	
2	Badarudin azarkasyi MM	Penguji II	

Palembang,

Menyetujui,


 (Ainur Ropik, M.Si)
 Dosen Pembimbing I


 (Siti Anisyah, M.Si)
 Dosen Pembimbing II

